



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Marabahan, Mei 2025
BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMU



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional kegiatan pemerintahan, laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi. Laporan Keuangan dimungkinkan mengandung informasi yang dapat menimbulkan potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi atau penjelasan atas angka-angka pada laporan keuangan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan juga akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan secara umum adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan maksud dan tujuan secara khusus penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- q. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2024, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- t. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- u. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini secara berurutan dimuat uraian dan penjelasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Diuraikan mengenai hal-hal yang bersifat umum sebagai pengantar laporan keuangan. Pada bagian ini juga dimuat mengenai:

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

Diuraikan mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Barito Kuala, Kebijakan Keuangan Daerah, dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berisi mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Diuraikan mengenai penjelasan entitas akuntansi pada Kabupaten Barito Kuala, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Barito Kuala.

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Diuraikan mengenai rincian dan penjelasan masing-masing laporan keuangan, meliputi unsur-unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

kewajiban, ekuitas.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1 Saldo Anggaran Awal

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.3 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3 Neraca

5.3.1 Aset Lancar

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.3 Aset Tetap

5.3.4 Dana Cadangan

5.3.5 Aset Lainnya

5.3.6 Kewajiban

5.3.7 Ekuitas

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan – LO

5.4.2 Beban – LO

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

5.4.5 Beban Luar Biasa

5.4.6 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

5.4.7 Surplus/Defisit – LO

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- 5.5.5 Kenaikan Penurunan Kas
- 5.5.6 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus Defisit – LO
 - 5.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI PENUTUP



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

BAB II
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh berbeda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan, keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angka keparahan kemiskinan, maka semakin parah kemiskinannya. Adapun Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	4,60	4,31	(0,29)
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	14.710	14.044	(666)
3	Provinsi (%)	4,29	4,11	(0,18)
4	Nasional (%)	9,36	9,03	(0,33)

**Kondisi Februari 2025*

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Barito Kuala



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Adapun Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,140	0,689
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,614	0,571
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,46

*Kondisi Februari 2025

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Barito Kuala

Adapun Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,395	0,156
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,158	0,116
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,35

* Kondisi Februari 2025

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Barito Kuala

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,42	3,41	(0,01)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,31	4,20	(0,11)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	(0,32)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Barito Kuala

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent*



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq IPM < 70$);
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Adapun Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel Berikut.

No	IPM (Tingkat)		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kabupaten/Kota		70,67	71,40
2	Provinsi		74,66	75,19
3	Indonesia/Nasional		74,39	75,02

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Barito Kuala

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena masyarakat merupakan pemilik faktor produksi. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel Berikut.

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	6.155,85	6.406,42	6.728,29	156.756,94	12.920.281,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,59	4,07	5,02	5,05	5,03

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Barito Kuala

2.1.5 Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Kuala

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Adapun PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dalam Miliar Rupiah dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.613,93	2.755,50	2.960,40
2	Pertambangan dan Penggalian	8,68	9,18	9,43
3	Industri Pengolahan	1.505,58	1.535,28	1.621,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,28	12,09	12,82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	28,56	30,38	31,66
6	Konstruksi	1.414,82	1.565,54	1.697,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.301,65	1.433,78	1.538,40
8	Transportasi dan Pergudangan	334,73	370,08	406,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	238,86	262,59	291,66
10	Information and Communication	222,49	239,88	256,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	178,18	194,92	207,77
12	Real Estate	378,02	415,54	448,28
13	Jasa Perusahaan	16,39	18,01	19,65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	745,79	795,62	852,74
15	Jasa Pendidikan	622,05	661,72	706,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	159,73	172,43	184,40
17	Jasa lainnya	87,13	95,34	104,14
18	Produk Domestik Regional Bruto	9.867,87	10.567,88	11.350,36

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Barito Kuala

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala telah menyusun arah dan kebijakan umum APBD (KUA) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran. Arah dan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 ini tertuang dalam kesepakatan bersama antara Bupati Barito Kuala dengan Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala. Dalam perencanaan APBD Kabupaten Barito Kuala TA 2024 memperhatikan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut.

a. Keadilan anggaran

Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan semakin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan, serta retribusi yang



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil supaya hasilnya dapat dinikmati secara proporsional oleh para wajib pajak, wajib retribusi, maupun masyarakat luas. Penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat daerah.

b. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan *incremental* yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Sehingga penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.

c. Anggaran Berbasis Kinerja

APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, struktur APBD haruslah mampu memberikan informasi tentang kinerja yang ingin dicapai, keadaan, dan kondisi ekonomi serta potensi yang dimiliki oleh daerah. Sehingga APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi dinas/badan/instansi/unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya alokasi dana pada berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat (*value for money*) dan kepuasan masyarakat (*public satisfaction*) sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik (*public accountability*).

Pada anggaran yang berbasis kinerja, tolak ukur kinerja merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja yang mencerminkan keberhasilan yang dicapai pada setiap dinas/badan/instansi/unit kerja. Tolak ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan diselenggarakan oleh dinas/badan/instansi/unit kerja perangkat daerah. Selanjutnya, penilaian kinerja dapat menggunakan ukuran penilaian berdasarkan pada indikator-indikator sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- 1) Masukan (*Input*), yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, SDM, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan;
- 2) Keluaran (*Output*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan;
- 3) Hasil (*Outcome*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- 4) Manfaat (*Benefit*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah; dan
- 5) Dampak (*Impact*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Pada hakikatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuangan, maupun Pinjaman Daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, akan tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak terduga, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan.

d. Disiplin Anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. APBD adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk satu tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan pencatatan atas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia.

Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya. Bila ada kegiatan baru yang harus dilaksanakan akan tetapi belum tersedia kredit anggarannya, maka harus terlebih dahulu diusulkan dan kemudian diproses dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas Tahun Anggaran berjalan. Sementara Penetapan Perubahan APBD itu sendiri harus dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Anggaran yang tersedia pada setiap Kode Rekening Belanja merupakan basis tertinggi pengeluaran pada kelompok belanja berkenaan. Oleh karenanya dinas/badan/instansi/unit kerja perangkat daerah tidak diperkenankan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

melaksanakan kegiatan/belanja melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan dalam strategi dan prioritas, terutama untuk program/kegiatan yang ditujukan bagi peningkatan pelayanan masyarakat (pelayanan publik). Sehingga dapat dihindari pengalokasian anggaran pada kegiatan/belanja yang tidak efisien.

e. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Sejalan dengan *Code of Good Practices on Fiscal Transparency*, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat, maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana untuk mencapai target kinerja Tahun 2024 memuat uraian tentang program-program dan kegiatan yang direncanakan dalam TA 2024 yang diuraikan pada setiap bidang pemerintahan dengan menggunakan tolok ukur (indikator) keberhasilan dan target kinerja (tingkat pencapaian) berdasarkan standar pelayanan yang tercantum dalam Rencana Strategis Daerah Kabupaten Barito Kuala dan dijabarkan lebih dalam pada Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 serta Strategi dan Prioritas Anggaran Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Untuk mengoperasionalkan Arah Kebijaksanaan Umum melalui strategi dan prioritas anggaran tersebut maka Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menyusun rencana program/kegiatan dan target kinerja masing-masing.

Pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian kinerja memuat uraian mengenai pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan berikut tingkat pencapaian kinerjanya. Pengukuran pencapaian kinerja ini merupakan hal yang sangat penting dan dilakukan secara berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan dalam rangka mencapai keberhasilan di waktu yang akan datang.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

**BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan kinerja keuangan dari realisasi pendapatan, belanja, dan transfer dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 pada mekanisme APBD sebesar Rp1.914.671.166.231,16 atau 105,10% dari anggaran sebesar Rp1.821.774.903.684,00. Realisasi tersebut melampaui target atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.516.250.686.627,33, terjadi kenaikan realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp398.420.479.603,83 atau sebesar 26,28%.

Kemudian realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.940.569.847.297,07 atau 94,99% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.042.939.648.639,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2023 sebesar Rp1.574.853.217.491,20, terjadi kenaikan belanja dari dana APBD yaitu sebesar Rp365.716.629.805,87 atau 23,22%.

Selanjutnya, realisasi pada pos Transfer adalah sebesar Rp280.386.045.450,00 atau sebesar 99,85% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2024, yaitu Rp280.821.140.406,00. Rincian realisasi/pencapaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mekanisme APBD dapat dilihat pada **Lampiran A dan B**.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

- a. Pemerintah Daerah selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Arus Kas;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. SKPD selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan laporan keuangan TA 2024 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan Pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Akuntansi Neraca adalah basis akrual. Pada basis kas, pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Sedangkan basis akrual berarti aktiva, utang, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 adalah menggunakan nilai perolehan atau historis. Oleh karena itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggunakan mata uang rupiah.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan laporan keuangan TA 2024 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Penerapan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan didasarkan pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Klasifikasi Unsur Laporan Keuangan

1) Pendapatan

- a) Pendapatan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b) Pendapatan dikelompokkan berdasarkan sumber dan pusat pendapatan.

2) Belanja

- a) Belanja dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja;
- b) Belanja diklasifikasikan berdasarkan pusat belanja;
- c) Pusat Belanja dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung; dan
- d) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

3) Pembiayaan

- a) Pembiayaan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan; dan
- b) Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4) Aset

- a) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar;
- b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan;
- c) Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- d) Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan;
- e) Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*);
- f) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- g) Penyusutan dan akumulasi penyusutan diberlakukan dalam pencatatan aset tetap pemerintah daerah;
- h) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya; dan
- i) Aset lainnya terdiri atas tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi kerugian daerah, kemitraan pihak ketiga, aset tak berwujud termasuk hasil studi dan penelitian, serta aset lain-lain.

5) Kewajiban

- a) Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- b) Kewajiban jangka pendek terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, utang pajak, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, serta utang jangka pendek lainnya; dan
- c) Kewajiban jangka panjang terdiri atas utang dalam negeri dan utang luar negeri.

6) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

7) Arus Kas

- a) Arus kas diklasifikasikan dalam aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran;
- b) Arus kas dari aktivitas operasional mencakup penerimaan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga;
- c) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencakup penerimaan dari penjualan aset tetap serta penjualan aset lainnya, dan pengeluaran untuk pembelian/perolehan aset tetap dan pembelian/perolehan aset lainnya;
- d) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencakup penerimaan dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, dan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

penerimaan piutang, dan pengeluaran untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman jangka panjang;

- e) Arus kas dari aktivitas non anggaran mencakup penerimaan dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Pengeluaran untuk Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

8) Laporan Operasional

- a) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c) Klasifikasi Pendapatan- LO
Menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis;
- d) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang/lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan;
- e) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

9) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

b. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1) Aset Lancar

- a) Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan atau pada saat kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah;
- b) Piutang diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- c) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- d) Persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik;
- e) Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria: kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- f) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak diakui sebagai belanja dalam



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan

- g) Penyisihan piutang merupakan alat untuk melakukan penyesuaian untuk menjaga agar nilai piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Jangka Panjang

- a) Kebijakan pengakuan Investasi Jangka Panjang khususnya Investasi Non Permanen Lainnya atas penggaduhan hewan ternak mencakup penilaian dan penyisihan; dan
- b) Penyisihan Investasi Non Permanen atas hewan ternak didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak. Kebijakan penyisihan nilai investasi non permanen yang tak tertagih merupakan alat untuk melakukan penyesuaian agar nilai Investasi Non Permanen yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai setelah dikurangi dengan nilai Investasi Non Permanen yang tak tertagih. Penyisihan Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak tidak menyebabkan penghapusan atas investasi tersebut.

3) Aset Tetap

- a) Kebijakan pengakuan aset mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset;
- b) Harga perolehan yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap jika memenuhi sebagai berikut.
 - (1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli/dibangun lebih dari 12 bulan;
 - (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan (tidak untuk dijual/diserahkan); dan
 - (3) Nilai rupiah barang/pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala;
- c) Tidak semua belanja modal di Laporan Realisasi Anggaran dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap;
- d) Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan;
- e) Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap;
- f) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi (misalkan pengecatan gedung);
- g) Suatu belanja pemeliharaan (setelah perolehan) akan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (a) Bertambah ekonomis/efisiensi;
 - (b) Bertambah umur ekonomis;
 - (c) Bertambah volume; dan
 - (d) Bertambah kapasitas produksi.
 - (2) Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
 - h) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui sebagai aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya; dan
 - i) Penghapusan, Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca yang meliputi penghapusan dari daftar pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar aset tetap milik daerah ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang.
- 4) Kewajiban**
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- 5) Pendapatan**
- a) Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima;
 - b) Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan penerimaan bruto; dan
 - c) Koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian/penambahan pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan diakui sebagai pengurangan/penambahan pendapatan. Apabila pengembalian/penambahan terjadi pada periode akuntansi berikutnya diakui sebagai pengurangan/penambahan Ekuitas Dana Lancar.
- 6) Belanja**
- a) Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan;
 - b) Belanja non modal/investasi diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan;
 - c) Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah; dan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- d) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali/penambahan belanja) yang telah terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan/penambahan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Ekuitas Dana Lancar.

7) Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

8) Pendapatan-LO

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
 - (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b) Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut.
 - (1) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
 - (2) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
 - (3) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.
- c) Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan realisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.
- d) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- e) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- f) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasikan adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- g) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- h) Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- i) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - j) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO, bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - k) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - l) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 - m) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 - n) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut
- 9) Beban**
- a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - b) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
 - c) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - d) Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan realisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.
 - e) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - f) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - g) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
 - h) Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

- i) Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya dibawah kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).
- j) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- k) Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- l) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

1) Aset Lancar

- a) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- b) Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- c) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- d) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- e) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
- f) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

2) Aset Tetap

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- b) Aset tetap yang diperoleh tidak diketahui harga perolehannya maka dinilai berdasarkan harga pengganti atau harga pasar;
 - c) Apabila dilakukan penilaian kembali aset tetap maka nilai aset tetap didasarkan pada harga pasar;
 - d) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*installation cost*), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan biaya konstruksi dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - e) Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dicatat sebesar biaya perolehan;
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - g) Nilai kontrak konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi; dan
 - h) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Aset Moneter dalam Mata Uang Asing**
- Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 4) Kewajiban**
- a) Kewajiban dicatat berdasar nilai nominal; dan
 - b) Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 5) Ekuitas**
- Ekuitas dicatat sebesar nominal selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- 6) Pendapatan**
- Pendapatan dicatat sebesar nominal penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

7) Belanja

Belanja dicatat sebesar nominal pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

8) Pembiayaan

Pembiayaan dicatat sebesar nominal transaksi keuangan pemerintah, penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

9) Beban

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

d. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

1) Koreksi Kesalahan

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, capaian kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

3) Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut.

- a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dipperbandingkan dengan anggarannya.

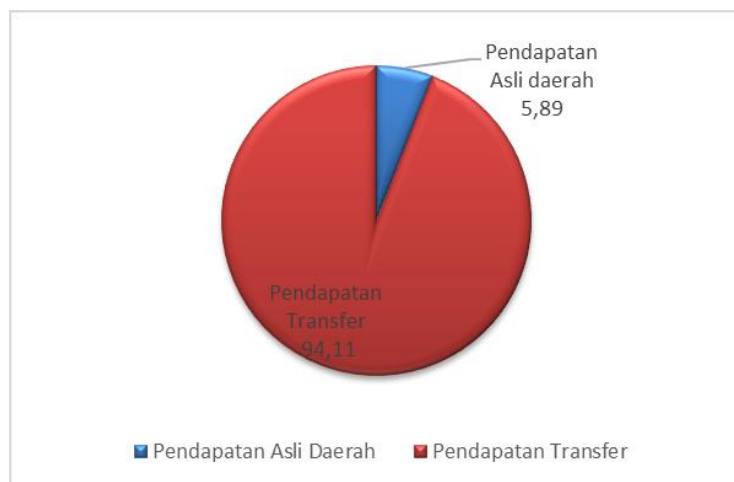
	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1 Pendapatan	1.821.774.903.684,00	1.914.671.166.231,16	1.516.250.686.627,33

Pada TA 2024 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.821.774.903.684,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.914.671.166.231,16 atau 105,10% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	97.985.725.574,00	112.705.523.011,16	115,02	97.380.866.592,39
2	Pendapatan Transfer	1.723.789.178.110,00	1.801.965.643.220,00	104,54	1.418.780.185.034,94
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	89.635.000,00
	Jumlah	1.821.774.903.684,00	1.914.671.166.231,16	105,10	1.516.250.686.627,33

Berdasarkan rincian pendapatan daerah di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan anggaran, Pendapatan Asli Daerah mencapai 115,02%, Pendapatan Transfer mencapai 104,54% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak di anggarkan pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2023, realisasi pendapatan daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp398.420.479.603,83 atau 26,28%.

Untuk proporsi Pendapatan Daerah, paling banyak berasal dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar 94,11%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya menyumbang 5,89% dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Untuk lebih jelas rincian dapat dilihat dari **Gambar 1** berikut.



Gambar 1 Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2024



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	97.985.725.574,00	112.705.523.011,16	97.380.866.592,39

Realisasi PAD untuk TA 2024 sebesar Rp112.705.523.011,16 atau 115,02% dari anggaran sebesar Rp97.985.725.574,00. Realisasi PAD TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp15.324.656.418,77 atau 15,74% dari realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp97.380.866.592,39. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	32.476.978.635,00	30.822.327.264,00	94,91	28.953.674.232,00
2	Retribusi Daerah	3.552.046.365,00	25.645.164.921,32	721,98	3.648.113.310,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.784.220.398,00	11.516.297.184,00	97,73	11.892.720.398,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	50.172.480.176,00	44.721.733.641,84	89,14	52.886.358.652,39
	Jumlah	97.985.725.574,00	112.705.523.011,16	115,02	97.380.866.592,39

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	32.476.978.635,00	30.822.327.264,00	28.953.674.232,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp30.822.327.264,00 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp32.476.978.635,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.868.653.032,00 atau 6,45% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp28.953.674.232,00. Penyumbang terbesar untuk pajak daerah diantaranya adalah BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan. Pendapatan Pajak Daerah secara rinci adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	80.000.000,00	61.708.769,00	77,14	66.119.705,00
2	Pajak Restoran	2.240.478.635,00	2.941.634.702,00	131,29	2.378.877.305,00
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	30.265.954,00	60,53	27.557.053,00
4	Pajak Reklame	140.000.000,00	178.504.750,00	127,50	153.976.725,00
5	Pajak Penerangan Jalan	15.350.000.000,00	17.107.544.278,00	111,45	15.290.068.293,00
6	Pajak Parkir	60.000.000,00	83.426.100,00	139,04	46.526.600,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	53.156.250,00	88,59	47.915.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00		0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.000.000.000,00	3.804.165.657,00	95,10	3.358.309.537,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.496.500.000,00	6.561.920.804,00	62,52	7.584.324.014,00
	Jumlah	32.476.978.635,00	30.822.327.264,00	94,91	28.953.674.232,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	3.552.046.365,00	25.645.164.921,32	3.648.113.310,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2024 sebesar Rp25.645.164.921,32 atau 721,98% dari anggaran sebesar Rp3.552.046.365,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp21.997.051.611,32 atau 602,97% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp3.648.113.310,00. Kenaikan Pendapatan Retribusi yang signifikan bersumber dari reklasifikasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan senilai Rp22.668.021.194,32 yang terdiri dari Rp1.048.578.724,07 pada 19 Puskesmas, Rp390.274.332,25 pada Klinik Setara, dan Rp21.229.168.138,00 pada RSUD H. Abdul Aziz yang berstatus BLUD yang sebelumnya dicatat pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – Pendapatan BLUD sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah.

Retribusi Jasa Umum merupakan pos retribusi daerah yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi yaitu sebesar Rp23.039.046.194,32 atau 89,83% dari total Pendapatan Retribusi Daerah. Selanjutnya pemberi kontribusi terbesar lainnya yaitu Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.676.751.650,00 atau 6,55% dari total Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	493.500.000,00	23.039.046.194,32	4668,50	1.517.568.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	71.500.000,00	22.700.291.194,32	31748,66	655.145.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.000.000,00	105.135.000,00	84,11	85.832.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	17.000.000,00	22.040.000,00	129,65	10.980.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	280.000.000,00	211.580.000,00	75,56	206.039.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	120.270.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	36.782.000,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	402.520.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.897.471.000,00	1.676.751.650,00	88,37	1.658.433.575,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.226.500.000,00	963.759.650,00	78,54	925.392.825,00
	Retribusi Terminal	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.810.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	1.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	177.768.000,00	148.660.000,00	83,63	182.197.000,00
	Retribusi Penyeberangan di Air	131.928.000,00	200.428.000,00	151,92	252.059.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	352.975.000,00	355.604.000,00	100,74	289.974.750,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.161.075.365,00	929.367.077,00	80,04	472.111.735,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	471.911.735,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.102.075.365,00	833.122.877,00	75,60	0,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	58.500.000,00	96.244.200,00	164,52	0,00
	Jumlah 1 + 2 + 3	3.552.046.365,00	25.645.164.921,32	721,98	3.648.113.310,00

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	11.784.220.398,00	11.516.297.184,00	11.892.720.398,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	PT Bank Kalsel	11.010.547.184,00	11.766.497.002,00
2	PT BPR Tapin Sejahtera	0,00	0,00
3	PD Aneka Usaha Selidah	0,00	17.723.396,00
4	PDAM Kabupaten Barito Kuala	0,00	0,00
5	PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	505.750.000,00	108.500.000,00
	Jumlah	11.516.297.184,00	11.892.720.398,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp376.423.214,00 atau 3,17% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp11.892.720.398,00.

Dalam hal penganggaran, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak dianggarkan berdasarkan jenis BUMD-nya, namun dianggarkan pada akun utamanya.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	50.172.480.176,00	44.721.733.641,84	52.886.358.652,39

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan asli daerah yang rinciannya tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp44.721.733.641,84 atau 89,14% dari anggaran sebesar Rp50.172.480.176,00. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.164.625.010,55 atau 15,44% dari realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp52.886.358.652,39. Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	701.500.000,00	813.879.380,00	116,02	632.982.900,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	36.000.000,00	54.118.000,00	150,33	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	4.900.000.000,00	5.401.862.197,48	110,24	10.275.300.523,33
4	Pendapatan Bunga	5.300.000.000,00	14.360.748.029,36	270,96	671.779.380,00
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.622.081.000,00	2.567.434.300,99	97,92	4.733.443.489,13
6	Pendapatan Denda Pajak	53.000.000,00	155.218.040,00	292,86	188.726.394,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	96.000.000,00	129.696.505,15	135,10	149.380.428,00
8	Pendapatan BLUD	36.463.899.176,00	21.238.777.188,86	58,25	36.234.745.537,93
	Jumlah	50.172.480.176,00	44.721.733.641,84	89,14	52.886.358.652,39

Penjelasan mengenai pos-pos pada Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada rincian berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan anggaran sebesar Rp701.500.000,00 terealisasi sebesar Rp813.879.380,00 terdiri dari:

No	SKPD	Hasil Penjualan	Nilai (Rp)
1	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	Alat Angkutan	35.188.400,00
2	Satpol PP	Alat Angkutan	57.983.000,00
3	DPPKBP3A	Alat Angkutan	44.791.000,00
4	Dinas Perhubungan	Alat Angkutan	43.675.000,00
5	Kecamatan Jejangkit	Alat Angkutan	2.045.333,00
6	Disbunak	Alat Angkutan	25.881.353,00
7	Kecamatan Tamban	Alat Angkutan	8.764.813,00
8	Kecamatan Mekarsari	Alat Angkutan	18.549.980,00
9	DPMPTSP	Alat Angkutan	5.327.180,00
10	Sekretariat Daerah	Alat Angkutan	3.150.005,00
11	RSUD H. Abdul Aziz Marabahn	Alat Angkutan	11.797.718,00
12	Sekretariat Daerah	Alat Angkutan	194.831.094,00
13	DKPP	Alat Angkutan	16.104.018,00
14	Kecamatan Anjir Pasar	Alat Angkutan	12.651.834,00
15	Bakesbangpol	Alat Angkutan	245.142,00
16	Kecamatan Wanaraya	Alat Angkutan	2.851.392,00
17	Satpol PP	Alat Angkutan	245.142,00
18	Distaan TPH	Alat Angkutan	245.142,00
19	Kecamatan Alalak	Alat Angkutan	245.142,00
20	DPUPR	Alat Angkutan	245.142,00
21	Sekretariat DPRD	Alat Angkutan	305.102.800,00
22	Kec. Rantau Badauh	Alat Angkutan	2.606.250,00
23	DPMPTSP	Alat Rumah Tangga	21.352.500,00
	Jumlah		813.879.380,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan anggaran sebesar Rp36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp54.118.000,00 terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sewa ruang kantor dan genset di BPKAD oleh Bank Kalsel	18.118.000,00
2	Sewa tanah untuk ATM Bank Kalsel di Kantor Camat Tamban	36.000.000,00
	Jumlah	54.118.000,00

3. Jasa Giro dengan anggaran sebesar Rp4.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.401.862.197,48, terdiri dari:

No	Rekening	Nilai (Rp)
1	Kas Daerah	5.165.919.426,03
2	Bendahara Pengeluaran SKPD	169.461.089,29
3	Sekolah	10.284.824,16
4	BOK Puskesmas	56.196.858,00
	Jumlah	5.401.862.197,48

4. Pendapatan bunga dengan anggaran sebesar Rp5.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp14.360.748.029,36, terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan bunga deposito pada Bank Kalsel	6.884.246.575,36
2	Remunerasi TDF 2024	7.476.501.454,00
	Jumlah	14.360.748.029,36

5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp2.622.081.000,00 terealisasi sebesar Rp2.567.434.300,99 pada BPKAD.

6. Pendapatan Denda Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp53.000.000,00 terealisasi sebesar Rp155.218.040,00 yaitu Pendapatan Denda Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada BPKAD.

7. Pendapatan dari Pengembalian dengan anggaran sebesar Rp96.000.000,00 terealisasi sebesar Rp129.696.505,15, terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS (BPKAD)	85.074.813,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler (Dinas Pendidikan)	44.621.200,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler (Dinas Pendidikan)	492,15
	Jumlah	129.696.505,15

8. Pendapatan BLUD dengan anggaran sebesar Rp36.463.899.176,00 terealisasi sebesar Rp 21.238.777.188,86 merupakan pendapatan dari klaim jaminan BPJS yang dikelola pemungutannya oleh RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan jumlah pendapatan sebesar Rp3.956.405.792,62, pendapatan dari klaim jaminan BPJS yang dikelola pemungutannya oleh 19 Puskesmas dengan jumlah pendapatan sebesar Rp17.112.248.091,24, dan pendapatan dari klaim jaminan BPJS yang dikelola



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

pemungutannya oleh Klinik Utama Setara dengan jumlah pendapatan sebesar Rp170.123.305,00, Rincian masing-masing pendapatan tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut.

No	BLUD	Nilai (Rp)
1	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	3.956.405.792,62
2	Puskesmas Anjir Muara	1.304.320.414,48
3	Puskesmas Anjir Pasar	1.002.418.147,11
4	Puskesmas Bantuil	575.106.810,00
5	Puskesmas Barambai	957.258.718,00
6	Puskesmas Belawang	750.062.670,23
7	Puskesmas Berangas	1.774.913.897,54
8	Puskesmas Jejangkit	411.984.780,86
9	Puskesmas Jelapat	1.037.856.587,00
10	Puskesmas Kuripan	380.765.592,71
11	Puskesmas Lepas	562.567.376,01
12	Puskesmas Mandastana	898.349.407,82
13	Puskesmas Marabahan	1.023.179.066,00
14	Puskesmas Mekarsari	660.109.753,00
15	Puskesmas Rantau Badauh	804.025.934,09
16	Puskesmas Semangat Dalam	1.092.675.954,00
17	Puskesmas Tabukan	546.726.233,00
18	Puskesmas Tabunganen	1.394.265.438,25
19	Puskesmas Tamban	1.108.416.891,14
20	Puskesmas Wanaraya	827.244.420,00
21	Klinik Utama Setara	170.123.305,00
22	UPT Pengolahan Limbah	0,00
	Jumlah	21.238.777.188,86

5.1.1.2 Pendapatan Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>1.723.789.178.110,00</u>	<u>1.801.965.643.220,00</u>	<u>1.418.780.185.034,94</u>

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer dari pemerintah provinsi.

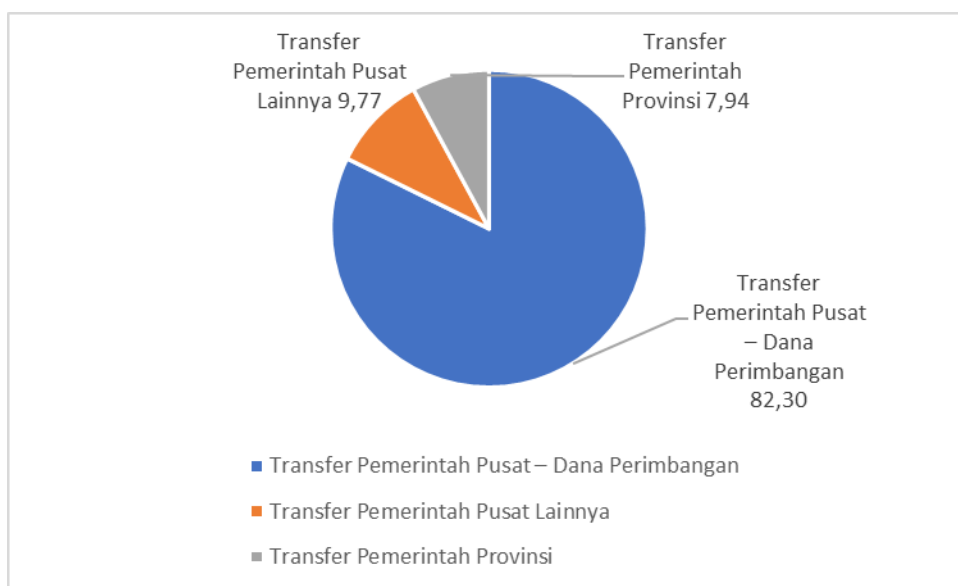
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.801.965.643.220,00 atau 104,54% dari anggaran sebesar Rp1.723.789.178.110,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp383.185.458.185,06 atau 27,01% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.418.780.185.034,94. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.433.649.252.110,00	1.482.967.167.232,00	103,44	1.125.357.223.505,94
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	176.009.926.000,00	176.009.926.000,00	100,00	160.808.051.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	114.130.000.000,00	142.988.549.988,00	125,29	132.614.910.529,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.723.789.178.110,00	1.801.965.643.220,00	104,54	1.418.780.185.034,94

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 paling besar bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan senilai Rp1.482.967.167.232,00 atau 82,30% dari total Pendapatan Transfer. Untuk lebih jelasnya realisasi pendapatan transfer pada TA 2024 dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.433.649.252.110,00	1.482.967.167.232,00	1.125.357.223.505,94

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.482.967.167.232,00 atau 103,44% dari anggaran sebesar Rp1.433.649.252.110,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp357.609.943.726,06 atau 31,78% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp1.125.357.233.505,94. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
----	--------	-----------------------	------------------------	---	------------------------



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	559.438.309.059,00	624.476.340.000,00	111,63	308.637.282.837,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	598.291.079.990,00	594.917.264.693,00	99,44	552.680.091.910,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.916.686.300,00	94.752.513.042,00	98,79	92.797.566.827,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	180.003.176.761,00	168.821.049.497,00	93,79	171.242.281.931,94
	Jumlah	1.433.649.252.110,00	1.482.967.167.232,00	103,44	1.125.357.223.505,94

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	176.009.926.000,00	176.009.926.000,00	160.808.051.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari dana insentif daerah, dana desa, dan insentif fiskal.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp176.009.926.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp176.009.926.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp15.201.875.000,00 atau 9,45% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 sebesar Rp160.808.051.000,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	-	5.792.351.000,00
2	Dana Desa	156.599.648.000,00	156.599.648.000,00	100,00	155.015.700.000,00
3	Insentif Fiskal	19.410.278.000,00	19.410.278.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	176.009.926.000,00	176.009.926.000,00	100,00	160.808.051.000,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	114.130.000.000,00	142.988.549.988,00	132.614.910.529,00

Pos Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pos yang digunakan untuk menampung pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari bagian pendapatan bagi hasil pajak untuk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 sebesar Rp142.988.549.988,00 atau 125,29% dari anggaran sebesar Rp114.130.000.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.373.639.459,00 atau 7,82% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Rp132.614.910.529,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00	9.635.486.814,00	96,35	30.416.710.297,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.000.000.000,00	11.466.525.375,00	95,55	14.109.002.692,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	76.000.000.000,00	103.870.813.718,00	136,67	70.531.703.671,00
4	Pajak Air Permukaan	130.000.000,00	282.263.214,00	217,13	324.385.343,00
5	Pajak Rokok	16.000.000.000,00	17.733.460.867,00	110,83	17.233.108.526,00
	Jumlah	114.130.000.000,00	142.988.549.988,00	125,29	132.614.910.529,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.635.000,00</u>

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang rinciannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan asli daerah atau pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	-	89.635.000,00
	Jumlah	0,00	0,00		89.635.000,00

Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak menganggarkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.1.2 Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>2.042.939.648.639,00</u>	<u>1.940.569.847.297,07</u>	<u>1.574.853.217.491,20</u>

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada TA 2024 sebesar Rp2.042.939.648.639,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.940.569.847.297,07 atau 94,99% sehingga terjadi efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp102.369.801.341,93. Secara umum, realisasi Belanja Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp365.716.629.805,87 atau 23,22% dari realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp1.574.853.217.491,20.

Nilai Belanja Daerah TA 2024 ini sudah termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sejak Tahun 2017 realisasi dana BOS masuk mekanisme APBD sehingga mulai tahun 2017 nilainya tidak hanya mempengaruhi Pendapatan dan Beban pada LO tetapi juga akan mempengaruhi nilai Pendapatan dan Belanja LRA.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.335.625.611.760,00	1.250.187.942.930,07	93,60	1.015.788.222.154,20
2	Belanja Modal	422.492.896.473,00	409.635.608.917,00	96,96	319.480.087.021,00
3	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	360.250.000,00	9,01	1.546.266.050,00

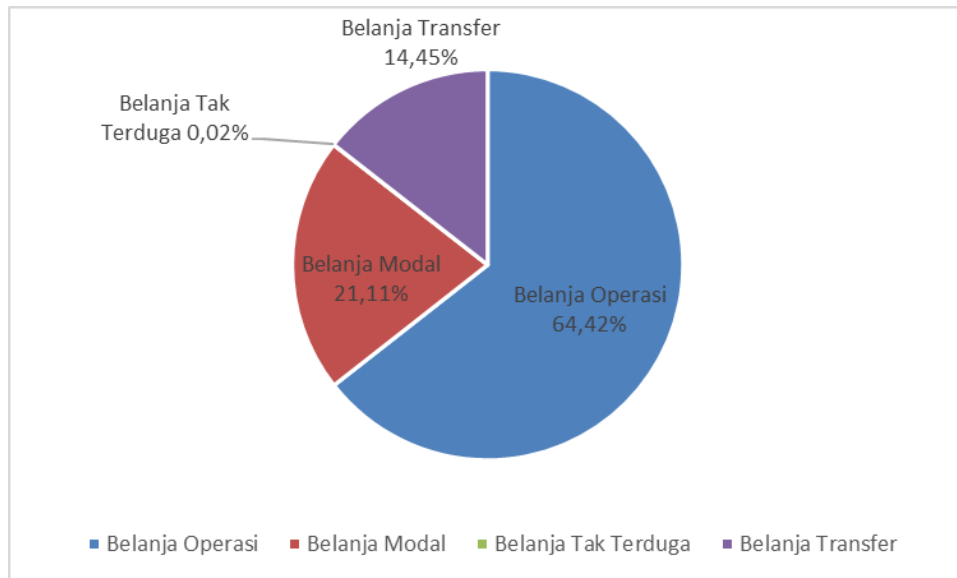


**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4	Belanja Transfer	280.821.140.406,00	280.386.045.450,00	99,85	238.038.642.266,00
	Jumlah	2.042.939.648.639,00	1.940.569.847.297,07	94,99	1.574.853.217.491,20

Proporsi jenis belanja masing -masing adalah Belanja Operasi sebesar 64,42%; Belanja Modal sebesar 21,11%; Belanja Tak Terduga 0,02%; dan Belanja Transfer sebesar 14,45% dari total Belanja Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3 Proporsi Realisasi Belanja TA 2024

5.1.2.1 Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>1.335.625.611.760,00</u>	<u>1.250.187.942.930,07</u>	<u>1.015.788.222.154,20</u>

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	762.667.111.169,00	721.931.268.434,80	94,66	597.465.705.627,00
2	Belanja Barang dan Jasa	492.438.175.005,00	448.404.479.750,27	91,06	355.946.017.093,20
3	Belanja Hibah	79.129.282.050,00	78.535.761.402,00	99,25	58.063.419.640,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.391.043.536,00	1.316.433.343,00	94,64	4.313.079.794,00
	Jumlah	1.335.625.611.760,00	1.250.187.942.930,07	93,60	1.015.788.222.154,20

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp1.250.187.942.930,07 atau 93,60% dari anggaran sebesar Rp1.335.625.611.760,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp234.399.720.775,87 atau 23,08% dari realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp1.015.788.222.154,20.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	<u>762.667.111.169,00</u>	<u>721.931.268.434,80</u>	<u>597.465.705.627,00</u>

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta uang lembur pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp721.931.268.434,80 atau 94,66% dari anggaran sebesar Rp762.667.111.169,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp124.465.562.807,80 atau 20,83% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp597.465.705.627,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	424.105.749.566,00	402.520.200.875,00	94,91	343.985.543.669,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	188.332.719.822,00	180.766.750.546,00	95,98	128.390.175.456,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.671.064.432,00	103.320.424.720,00	93,36	93.806.776.940,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.877.748.051,00	19.324.255.844,00	97,22	18.011.087.616,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.410.109.308,00	1.141.827.869,00	80,97	152.123.780,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	555.101.936,00	92,27	506.236.000,00
7	Belanja Pegawai BOSP	2.934.162.500,00	2.923.398.780,80	99,63	3.921.110.882,00
8	Belanja Pegawai BLUD	14.733.957.490,00	11.379.307.864,00	77,23	8.692.651.284,00
	Jumlah	762.667.111.169,00	721.931.268.434,80	94,66	597.465.705.627,00

Rincian Belanja Pegawai per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	<u>492.438.175.005,00</u>	<u>448.404.479.750,27</u>	<u>355.946.017.093,20</u>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa merupakan realisasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama TA 2024 dan 2023 yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp448.404.479.750,27 atau 91,06% dari anggaran sebesar Rp492.438.175.005,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp92.458.462.657,07 atau 25,98% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp355.946.017.093,20. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	74.525.932.964,00	67.742.520.154,00	90,90	69.027.342.424,00
2	Belanja Jasa	163.396.393.600,00	150.401.185.296,69	92,05	121.411.647.722,00
3	Belanja Pemeliharaan	62.946.222.912,00	61.059.093.902,30	97,00	36.838.146.987,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	118.736.433.835,00	100.462.989.166,00	84,61	73.778.178.794,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.243.906.000,00	9.937.755.980,00	97,01	4.764.674.170,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOSP	31.418.003.285,00	31.238.754.197,28	99,43	28.189.122.400,20
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.171.282.409,00	27.562.181.054,00	88,42	21.936.904.596,00
	Jumlah	492.438.175.005,00	448.404.479.750,27	91,06	355.946.017.093,20

Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Bunga	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Belanja bunga pemerintah daerah adalah pengeluaran anggaran untuk membayar bunga utang yang timbul dari pinjaman yang diterima pemerintah daerah. Ini termasuk biaya yang terkait dengan pinjaman, seperti biaya komitmen dan denda. Pada Tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Daerah Barito Kuala tidak menganggarkan Belanja Bunga.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Subsidi	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Belanja subsidi pemerintah daerah adalah pengeluaran anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak tertentu untuk membantu biaya produksi atau jasa, sehingga harga jual produk atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pada Tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Daerah Barito Kuala tidak menganggarkan Belanja Subsidi.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5 Belanja Hibah	<u>79.129.282.050,00</u>	<u>78.535.761.402,00</u>	<u>58.063.419.640,00</u>

Belanja Hibah merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp78.535.761.402,00 atau 99,25% dari anggaran sebesar Rp79.129.282.050,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.472.341.762,00 atau 35,26 % dari realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp58.063.419.640,00. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut,



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.202.848.200,00	28.202.847.400,00	100,00	20.617.966.600,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	41.206.163.350,00	40.833.069.331,00	99,09	36.260.093.040,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.265.430.500,00	1.265.429.432,00	100,00	1.185.360.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	8.454.840.000,00	8.234.415.239,00	97,39	0,00
	Jumlah	79.129.282.050,00	78.535.761.402,00	99,25	58.063.419.640,00

Rincian Belanja Hibah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>1.391.043.536,00</u>	<u>1.316.433.343,00</u>	<u>4.313.079.794,00</u>

Belanja Bantuan Sosial merupakan realisasi pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 dan 2023 untuk membantu organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Barito Kuala. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp1.316.433.343,00 atau 94,64% dari anggaran sebesar Rp1.391.043.536,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.996.646.451,00 atau 69,48% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp4.313.079.794,00. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	217.716.000,00	217.567.370,00	99,93	2.009.506.430,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	224.844.536,00	202.307.748,00	89,98	2.046.518.409,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	948.483.000,00	896.558.225,00	94,53	257.054.955,00
	Jumlah	1.391.043.536,00	1.316.433.343,00	94,64	4.313.079.794,00

5.1.2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (BKPD) adalah pengeluaran atau anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain (Kabupaten/Kota atau Desa/Kelurahan). Tujuan utama pemberian BKPD adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah lain, pemerataan, atau untuk mencapai tujuan tertentu lainnya. Pada Tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Daerah Barito Kuala tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

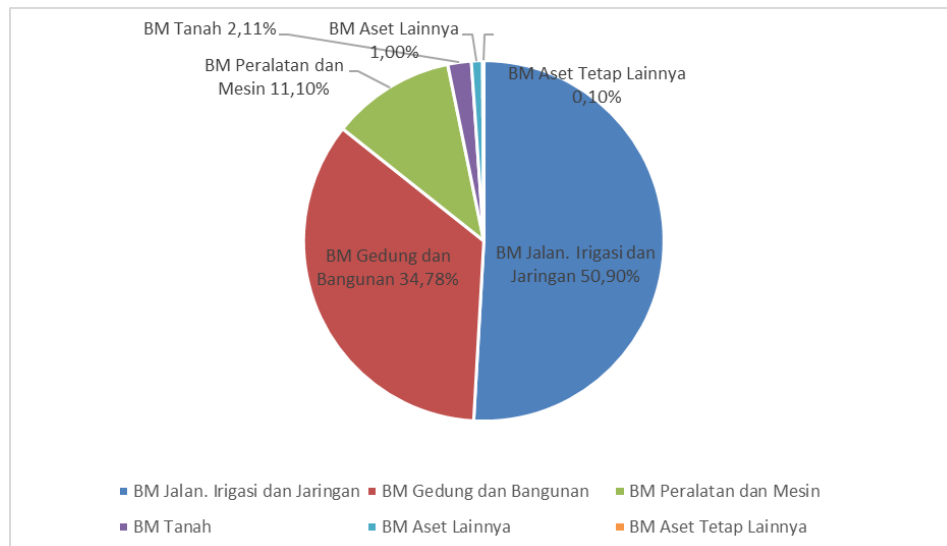
5.1.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	422.492.896.473,00	409.635.608.917,00	319.480.087.021,00

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp409.635.608.917,00 atau 96,96% dari anggaran sebesar Rp422.492.896.473,00. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp90.155.521.896,00 atau 28,22% dari realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp319.480.087.021,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	9.669.587.500,00	8.641.969.686,00	89,37	1.764.136.373,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.889.606.762,00	45.482.320.204,00	93,03	61.730.827.143,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.397.547.771,00	142.482.443.020,00	98,67	101.496.171.237,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.573.051.280,00	208.499.077.592,00	97,17	151.926.623.257,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	425.509.600,00	423.108.025,00	99,44	1.019.078.919,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.537.593.560,00	4.106.690.390,00	90,50	1.543.250.092,00
	Jumlah	422.492.896.473,00	409.635.608.917,00	96,96	319.480.087.021,00

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Proporsi realisasi Belanja Modal dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil yaitu Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 50,90%, Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar 34,78%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 11,10%, Belanja Modal Tanah sebesar 2,11%, Belanja Modal Aset Lainnya 1,00%, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,10% dari total Belanja Modal. Proporsi Belanja Modal TA 2024 dapat dilihat pada **Gambar 4** berikut.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Gambar 4 Proporsi Belanja Modal TA 2024

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	9.669.587.500,00	8.641.969.686,00	1.764.136.373,00

Belanja Modal Tanah merupakan realisasi pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 dan 2023 untuk pengadaan tanah yang akan digunakan dalam rangka mendukung operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	9.499.587.500	8.507.371.086	89,56	1.132.153.159,00
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	170.000.000	134.598.600	79,18	0,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	-	134.046.930,00
4	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	-	177.647.254,00
5	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	0,00	0,00	-	320.289.030,00
	Jumlah	9.669.587.500,00	8.641.969.686,00	89,37	1.764.136.373,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp8.641.969.686,00 atau 89,37% dari anggaran sebesar Rp9.669.587.500,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.877.833.313,00 atau 389,87% dari realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp1.764.136.373,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	48.889.606.762,00	45.482.320.204,00	61.730.827.143,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan realisasi pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 dan 2023 untuk pengadaan/pembelian alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer dan peralatan mesin lainnya.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp45.482.320.204,00 atau 93,03% dari anggaran sebesar Rp48.889.606.762,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp16.248.506.939,00 atau 26,32% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp61.730.827.143,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	2.075.966.200,00	2.062.500.000,00	99,35	435.300.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	13.326.409.216,00	12.601.182.639,00	94,56	13.578.901.946,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	529.300.000,00	452.050.000,00	85,41	36.372.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.381.289.902,00	1.356.166.600,00	98,18	999.501.872,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.740.380.751,00	7.398.837.700,00	95,59	5.137.268.498,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	834.181.675,00	699.119.821,00	83,81	2.115.670.063,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.496.651.320,00	4.268.714.574,00	94,93	23.332.267.234,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.582.233.000,00	2.571.707.300,00	99,59	11.789.844.696,00
9	Belanja Modal Komputer	5.035.773.960,00	4.864.847.072,00	96,61	4.257.142.082,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	35.027.000,00	34.890.000,00	99,61	0,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	120.450.000,00	113.786.036,00	94,47	48.558.752,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.577.876.158,00	5.563.352.368,00	99,74	0,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.079.067.580,00	3.420.166.094,00	67,34	0,00
	Jumlah	48.889.606.762,00	45.482.320.204,00	93,03	61.730.827.143,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>144.397.547.771,00</u>	<u>142.482.443.020,00</u>	<u>101.496.171.237,00</u>

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan realisasi pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 dan 2023 untuk pengadaan aset berupa bangunan gedung dan monumen.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp142.482.443.020,00 atau 98,67% dari anggaran sebesar Rp144.397.547.771,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.986.271.783,00 atau 40,38% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp101.496.171.237,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	143.483.700.826,00	141.647.806.602,00	98,72	101.003.667.225,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	80.000.000,00	79.955.000,00	99,94	492.504.012,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	833.846.945,00	754.681.418,00	90,51	0,00
	Jumlah	144.397.547.771,00	142.482.443.020,00	98,67	101.496.171.237,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	214.573.051.280,00	208.499.077.592,00	151.926.623.257,00

Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan merupakan realisasi pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 dan 2023 untuk pengadaan aset berupa jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi), dan instalasi.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp208.499.077.592,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp214.573.051.280,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp56.572.454.335,00 atau 37,24% dari realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp151.926.623.257,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	168.176.364.607,00	164.052.599.235,00	97,55	128.297.163.768,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	4.308.138.500,00	3.968.675.114,00	92,12	0,00
3	Belanja Modal Instalasi	646.958.173,00	623.915.939,00	96,44	3.374.950.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	41.441.590.000,00	39.853.887.304,00	96,17	20.254.509.489,00
	Jumlah	214.573.051.280,00	208.499.077.592,00	97,17	151.926.623.257,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	425.509.600,00	423.108.025,00	1.019.078.919,00

Realisasi Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp423.108.025,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar Rp425.509.600,00. Realisasi Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp595.970.894,00 atau 58,48%. dari realisasi Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp1.019.078.919,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	255.000.000,00	254.698.425,00	99,88	407.171.200,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3	Belanja Modal Hewan	170.100.000,00	168.000.000,00	98,77	59.850.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	549.557.719,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	409.600,00	409.600,00	100,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	425.509.600,00	423.108.025,00	99,44	1.019.078.919,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	4.537.593.560,00	4.106.690.390,00	1.543.250.092,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 merupakan anggaran dan realisasi atas Belanja Modal berupa Aset Tidak Berwujud. Realisasi Belanja Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp4.106.690.390,00 atau 90,50% dari anggaran sebesar Rp4.537.593.560,00. Realisasi Belanja Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.563.440.298,00 atau 166,11% dari realisasi Belanja Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp1.543.250.092,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Software	985.593.560,00	957.778.560,00	97,18	0,00
2	Kajian	2.852.000.000,00	2.559.779.330,00	89,75	0,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	700.000.000,00	589.132.500,00	84,16	1.543.250.092,00
	Jumlah	4.537.593.560,00	4.106.690.390,00	90,50	1.543.250.092,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	4.000.000.000,00	360.250.000,00	1.546.266.050,00

Belanja Tidak Terduga merupakan realisasi pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 dan 2023 yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp360.250.000,00 atau 9,01% dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.186.016.050,00 atau 76,70% dari realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp1.546.266.050,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	280.821.140.406,00	280.386.045.450,00	238.038.642.266,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp 280.386.045.450,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp 280.821.140.406,00. Realisasi Belanja Transfer TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp42.347.403.184,00 atau 17,79% dari realisasi Belanja Transfer TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

sebesar Rp238.038.642.266,00. Anggaran dan realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil	3.610.530.600,00	3.260.178.705,00	90,30	2.928.080.492,00
2	Bantuan Keuangan	277.210.609.806,00	277.125.866.745,00	99,97	235.110.561.774,00
	Jumlah	280.821.140.406,00	280.386.045.450,00	99,85	238.038.642.266,00

5.1.2.4.1 Belanja Transfer Bagi Hasil	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>3.610.530.600,00</u>	<u>3.260.178.705,00</u>	<u>2.928.080.492,00</u>

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp3.260.178.705,00 atau 90,30% dari anggaran sebesar Rp3.610.530.600,00. Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp332.098.213,00 atau 11,34% dari realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp2.928.080.492,00. Anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	3.004.000.000,00	2.895.367.424,00	96,38	2.530.800.556,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	606.530.600,00	364.811.281,00	60,15	397.279.936,00
	Jumlah	3.610.530.600,00	3.260.178.705,00	90,30	2.928.080.492,00

Alokasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/444/KUM/2024 tentang Alokasi Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2024. Belanja Transfer Bagi Hasil direalisasikan kepada 195 pemerintah desa di 17 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.4.2 Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>277.210.609.806,00</u>	<u>277.125.866.745,00</u>	<u>235.110.561.774,00</u>

Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp277.125.866.745,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp277.210.609.806,00. Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp42.015.304.971,00 atau 17,87% dari realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp235.110.561.774,00. Anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.586.537.400,00	5.501.794.339,00	98,48	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah	271.624.072.406,00	271.624.072.406,00	100,00	235.110.561.774,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
	Jumlah	277.210.609.806,00	277.125.866.745,00	99,97	235.110.561.774,00

Pelaksanaan Belanja Transfer Bantuan Keuangan ditetapkan melalui:

- a. Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi rancangan APBD Pemkab Barito Kuala sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01060/KUM/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang

APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penjabaran APBD TA 2024;

- b. Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan:

- 1) Nilai Dana Desa ditetapkan melalui:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2024;
- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa TA 2024;

- 2) Nilai Alokasi Dana Desa telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD bagi Setiap Desa TA 2024 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD bagi Setiap Desa TA 2024. Nilai anggaran ADD TA 2024 sebesar Rp115.024.424.406,00.

- 3) Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa berupa Dana Desa direalisasikan kepada 195 pemerintah desa di 17 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala dengan anggaran senilai Rp156.599.648.000,00 dan terealisasi 100% senilai Rp156.599.648.000,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.3	Pembiayaan Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		<u>221.164.744.955,00</u>	<u>221.123.475.955,44</u>	<u>279.767.275.819,31</u>

Realisasi Pembiayaan Daerah Neto TA 2024 sebesar Rp221.123.475.955,44 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp221.164.744.955,00. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp58.643.799.863,87 atau 20,96% dari realisasi Pembiayaan Neto TA 2023 sebesar Rp279.767.275.819,31. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	229.164.744.955,00	228.705.156.955,44	99,80	295.267.275.819,31
2	Pengeluaran Pembiayaan	(8.000.000.000,00)	(7.581.681.000,00)	94,77	(15.500.000.000,00)
	Jumlah	221.164.744.955,00	221.123.475.955,44	99,98	279.767.275.819,31

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>229.164.744.955,00</u>	<u>228.705.156.955,44</u>	<u>295.267.275.819,31</u>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp228.705.156.955,44 atau 99,80% dari anggaran sebesar Rp229.164.744.955,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp66.562.118.863,87 atau 22,54% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp295.267.275.819,31. Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	221.164.744.955,00	221.164.744.955,44	100,00	287.620.555.052,31
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	7.540.412.000,00	94,26	7.646.720.767,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	229.164.744.955,00	228.705.156.955,44	99,80	295.267.275.819,31

5.1.3.1.1 Penggunaan SILPA Tahun Lalu	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>221.164.744.955,00</u>	<u>221.164.744.955,44</u>	<u>287.620.555.052,31</u>

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 sebesar Rp221.164.744.955,44 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp221.164.744.955,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp66.455.810.096,87 atau 23,11% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp287.620.555.052,31.

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>8.000.000.000,00</u>	<u>7.540.412.000,00</u>	<u>7.646.720.767,00</u>

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman TA 2024 sebesar Rp7.540.412.000,00 atau 94,26% dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi Penerimaan Kembali



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Pemberian Pinjaman TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp106.308.767,00 atau 1,39% dari realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman TA 2023 sebesar Rp7.646.720.767,00.

Penerimaan kembali pinjaman merupakan realisasi penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2024 dan 2023 yang berasal dari pembayaran oleh koperasi di lingkungan Kabupaten Barito Kuala yang menerima dana pinjaman untuk pupuk bersubsidi senilai Rp7.529.162.000,00. Sedangkan untuk penerimaan sebesar Rp11.250.000,00 merupakan penerimaan pembayaran dari UMKM Diskoperindag.

Penyaluran dan pengembalian pinjaman pupuk disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Bank BPR Batola dan KUD yang terdaftar, yang kemudian disalurkan pada kelompok tani. Adapun rincian penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah adalah sebagai berikut.

No	Nama Peminjam	Nilai Pengembalian Pinjaman (Rp)
1	PT BPR Batola	23.635.000,00
2	KUD Kenanga	1.236.290.000,00
3	KUD Karya Bersama	68.887.000,00
4	KSU Harapan Sejahtera	1.610.901.000,00
5	KSU Kencana Makmur	306.990.000,00
6	KUD Dwi Karya	491.420.000,00
7	KUD Basunondo	1.725.138.000,00
8	KUD Daya Guna	2.065.901.000,00
9	UMKM Diskoperindag	11.250.000,00
Jumlah Pengembalian Pinjaman Daerah		7.540.412.000,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>8.000.000.000,00</u>	<u>7.581.681.000,00</u>	<u>15.500.000.000,00</u>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp7.581.681.000,00 atau 94,77% dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.918.319.000,00 atau 51,09% dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp15.500.000.000,00. Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 adalah sebagai berikut.

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	7.581.681.000,00	94,77	8.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		8.000.000.000,00	7.581.681.000,00	94,77	15.500.000.000,00

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
---	-----------------------	------------------------	------------------------



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

0,00

0,00

7.500.000.000,00

Tidak terdapat penganggaran untuk Penyertaan Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2024 .

5.1.3.2.2 Pemberian Pinjaman Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>8.000.000.000,00</u>	<u>7.581.681.000,00</u>	<u>8.000.000.000,00</u>

Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah TA 2024 sebesar Rp7.581.681.000,00 atau 94,77% dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp418.319.000,00 atau 5,23% dari realisasi Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00.

Pemberian Pinjaman Daerah merupakan pemberian pinjaman angsuran berjangka dan tanpa bunga yang diberikan kepada petani untuk pembelian pupuk bersubsidi melalui KUD/KSU dan PT BPR Barito Kuala sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/78/KUM/2022 tentang Penetapan Koperasi dan PT BPR Batola Penerima Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pembelian Pupuk Bersubsidi kepada Petani TA 2024 dengan rincian pinjaman sebagai berikut.

No	Nama Penerima Pinjaman	Nilai Pemberian Pinjaman (Rp)
1	KUD Kenanga	1.266.608.000,00
2	KUD Karya Bersama	72.537.000,00
3	KSU Harapan Sejahtera	1.617.239.000,00
4	KSU Kencana Makmur	307.380.000,00
5	KUD Dwi Karya	491.420.000,00
6	KUD Basunondo	1.802.533.000,00
7	KUD Daya Guna	2.023.964.000,00
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	7.581.681.000,00

5.1.4 SILPA Tahun Berjalan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>195.224.794.889,53</u>	<u>221.164.744.955,44</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	1.821.774.903.684,00	1.914.671.166.231,16	105,10	1.516.250.686.627,33
2	Belanja	2.042.939.648.639,00	1.940.569.847.297,07	94,99	1.574.853.217.491,20
3	Surplus (Defisit) (1 – 2)	(221.164.744.955,00)	(25.898.681.065,91)	11,71	(58.602.530.863,87)
4	Pembiayaan Neto	221.164.744.955,00	221.123.475.955,44	99,98	279.767.275.819,31



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	SILPA Tahun Berjalan (3 + 4)	0,00	195.224.794.889,53	0,00	221.164.744.955,44



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2024 adalah sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u><u>221.164.744.955,44</u></u>	<u><u>287.620.555.052,31</u></u>

Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp221.164.744.955,44 dan Rp287.620.555.052,31 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp66.455.810.096,87 atau 23,11% dari SAL awal tahun 2023.

Nilai anggaran untuk SAL awal tahun 2024 yang diinput pada SIPD RI sebesar Rp221.164.744.955,00 sebagai penggunaan SAL pada penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp221.164.744.955,44 dan sesuai dengan realisasi SILPA *audited* tahun 2023. Sehingga terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasai senilai Rp0,44. Hal ini dikarenakan aplikasi SIPD belum mengakomodir penginputan angka desimal.

SAL Awal tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u><u>221.164.744.955,44</u></u>	<u><u>287.620.555.052,31</u></u>

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp221.164.744.955,44 dan Rp287.620.555.052,31 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp66.455.810.096,87 atau 23,11% dari SAL awal tahun 2023.

Penggunaan SAL sebesar Rp221.164.744.955,44 telah direalisasikan sebagai penggunaan SILPA TA 2024 yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u><u>195.224.794.889,53</u></u>	<u><u>221.164.744.955,44</u></u>

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp195.224.794.889,53 dan Rp221.164.744.955,44 sehingga terdapat penurunan sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Rp25.939.950.065,91 atau 11,73% dari Penggunaan SiLPA tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Lebih Realisasi Pendapatan terhadap Anggaran	92.896.262.547,16	117.496.275.929,33
2	Kurang Realisasi Belanja terhadap Anggaran	102.369.801.341,93	104.055.966.186,80
3	Lebih Realisasi Transfer terhadap Anggaran	0,00	0,00
4	Kurang Realisasi Pendapatan Pembiayaan	(459.587.999,56)	(387.497.160,69)
5	Lebih Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	418.319.000,00	0,00
	Jumlah SiLPA	195.224.794.889,53	221.164.744.955,44

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>195.224.794.889,53</u>	<u>221.164.744.955,44</u>

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp195.224.794.889,53 dan Rp221.164.744.955,44 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp25.939.950.065,91 atau 11,73% dari Penggunaan SiLPA tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	181.498.730.988,83	205.475.338.778,99
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerima	0,00	37.443.200,00
4	Kas di BLUD	9.588.617.202,89	15.373.307.774,71
5	Kas di BOS	249.400.748,81	278.655.201,74
6	Kas di BOK Puskesmas	3.888.045.949,00	0,00
	Jumlah	195.224.794.889,53	221.164.744.955,44



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan secara komparatif. Ringkasan Neraca per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Lancar	527.489.343.618,41	281.490.273.079,76
2	Investasi Jangka Panjang	161.487.539.314,35	164.748.664.142,45
3	Aset Tetap	2.580.044.381.535,70	2.163.690.083.538,32
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	71.690.089.237,90	291.422.096.998,67
	Jumlah Aset	3.340.711.353.706,36	2.901.351.117.759,20
6	Kewajiban Jangka Pendek	44.885.173.753,13	35.295.124.143,23
7	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
8	Ekuitas	3.295.826.179.953,23	2.866.055.993.615,97
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.340.711.353.706,36	2.901.351.117.759,20

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1 Aset Lancar	(Rp)	(Rp)
	527.489.343.618,41	281.490.273.079,76

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp527.489.343.618,41 dan Rp281.490.273.079,76. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp245.999.070.538,65 atau 87,39% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	181.498.730.988,83	205.475.338.778,99
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	37.443.200,00
4	Kas di BLUD	9.588.617.202,89	15.373.307.774,71
5	Kas di FKTP	0,00	0,00
6	Kas di BOS	249.400.748,81	278.655.201,74
7	Kas Lainnya	0,00	0,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	3.888.045.949,00	0,00
9	Piutang Pajak (Neto)	6.830.956.223,25	6.765.587.731,50
10	Piutang Retribusi (Neto)	41.977.350,00	149.733.994,00
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neto)	4.668.968.186,17	2.190.711.875,00
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Neto)	271.680.320.520,00	4.520,00
13	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Neto)	35.656.446.607,00	37.323.396.956,00
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(Neto)		
15	Piutang Lainnya (Neto)	984.251.625,00	1.271.070.575,00
16	Persediaan	12.401.628.217,46	12.625.022.472,82
	Jumlah Aset Lancar	527.489.343.618,41	281.490.273.079,76

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>181.498.730.988,83</u>	<u>205.475.338.778,99</u>

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas dan setara kas yang dikuasai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan dalam rekening giro pada Bank Kalsel dengan nomor rekening 012.00.03.00002.2. Rekening Kas Daerah dibuka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/336/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Bank sebagai Pengelola Rekening Kas Umum Daerah. RKUD juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/16/KUM/2024 tanggal 02 Januari 2024.

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp181.498.730.988,83 dan Rp205.475.338.778,99. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.976.607.790,16 atau 11,67 % dari saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Sisa DAK	56.705.176,00	10.734.700,00
	a. Sisa Tahun Sebelumnya	51.484.076,00	10.734.700,00
	b. Tahun 2024	5.221.100,00	0,00
2	Sisa DAK Non Fisik	2.455.173.271,00	4.446.233.038,00
	a. Tambahan Penghasilan Guru	626.750.000,00	13.487.000,00
	b. Tunjangan Profesi Guru	570.507.648,00	2.954.614.000,00
	c. Tunjangan Khusus Guru	186.378.500,00	59.330.000,00
	d. BOP PAUD	0,00	0,00
	e. Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00
	f. Bantuan Operasional Kesehatan	861.943.026,00	972.882.634,00
	g. Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	0,00	0,00
	h. Bantuan Operasional Keluarga Berencana	149.414.669,00	155.722.830,00
	i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	35.695.125,00	9.945.090,00
	j. Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00
	k. Dana PK2UKM	0,00	281.645,00
	l. BOP Kesetaraan	0,00	0,00
	m. Dana Fasilitas Penanaman Modal	0,00	247.614.375,00
	n. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.484.303,00	32.355.464,00
3	Sisa Dana Insentif Daerah	617.675.332,00	9.408.010,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	a. Intensif Fiskal Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat	617.675.332,00	9.408.010,00
4	Sisa Dana Lain (DAU, PAD, dan Lainnya)	178.369.177.209,83	201.008.963.030,99
	a. DAU Bidang Pekerjaan Umum	926.900.547,00	0,00
	b. DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.830.994,00	0,00
	c. DAU Bidang Pendidikan	743.298.847,00	0,00
	d. DAU Bidang Kesehatan	1.282.879.044,00	0,00
	e. DAU SG Penggajian PPPK	0,00	0,00
	f. DBH Sawit	386.902.389,00	0,00
	g. Lainnya	175.024.365.388,83	201.008.963.030,99
	Jumlah Kas di Kas Daerah	181.498.730.988,83	205.475.338.778,99

Terdapat selisih pencatatan antara Kas Manual Pemerintah Daerah dan SIPD RI dengan Rekening Koran 31 Desember 2024 sebesar Rp15.045.757,49 antara lain sebagai berikut.

- Tax Amount Due (31 Agustus 2024) sebesar Rp217,49;
- Kekurangan SP2D Nomor: 6304/040/000172/LS/106000000010000/PPR1/12/2024 sebesar Rp540,00; dan
- Kesalahan sistem sebesar Rp15.045.000,00

Selisih Kas Manual Pemerintah Daerah dan SIPD RI dengan Rekening Koran 31 Desember 2024 telah diperbaiki oleh Bank Kalsel berdasarkan tiga surat sebagai berikut.

- Surat Nomor 9/Pel-MRB/KC/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Pengembalian Rekening Kasda Terdebet. Surat tersebut berisi tentang kesalahan pendebitan Rekening RKUD Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp217,49 yang telah diperbaiki oleh Bank Kalsel. Pengembalian kesalahan pendebitan pada tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp217,49 dengan keterangan pengembalian Tax Amount Due.
- Surat Nomor 10/Pel-MRB/KC/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Pengembalian Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Surat tersebut berisi tentang kesalahan Debet yang seharusnya didebet dari rekening penerima namun terdebit di rekening RKUD Kabupaten Barito Kuala sehingga mengakibatkan selisih Rp540,00. Kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Bank Kalsel. Pengembalian dari kesalahan debet tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025 sebesar Rp540,00 ke rekening RKUD Kabupaten Barito Kuala dengan keterangan "Pengembalian kelebihan debet nomor SP2D 63.04/04.0/000172/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024".
- Surat Nomor 28/Pel-MRB/KC/2025 tanggal 03 Februari 2025 perihal Pengembalian Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Surat tersebut berisi tentang adanya selisih saldo pada rekening RKUD Kabupaten Barito Kuala periode bulan Mei 2024 dikarenakan adanya kesalahan sistem yang melakukan pendebitan sebanyak 2 kali. Adapun untuk nilai debetnya sebanyak 2 kali sebesar Rp30.090.000,00 yang



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

seharusnya hanya dilakukan pendebitan sekali saja sebesar Rp15.045.000,00. Kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Bank Kalsel dengan mengembalikan kelebihan debit tersebut pada tanggal 03 Februari 2025 sebesar Rp15.045.000,00 ke rekening RKUD Kabupaten Barito Kuala dengan keterangan “Pengembalian Saldo Karena Kesalahan Sistem Double Debet SP2D nomor 63.04/04.0/000641/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024”.

5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>0,00</u>	<u>37.443.200,00</u>

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp37.443.200,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp37.443.200,00 atau 100% dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023.

5.3.1.4 Kas di BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>9.588.617.202,89</u>	<u>15.373.307.774,71</u>

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.588.617.202,89 dan Rp15.373.307.774,71. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.784.690.571,82 atau 37,63% dari saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	SK Pembentukan BLUD
1	RSUD H. Abdul Azis Marabahan	6.726.370.902,93	5.847.199.521,31	188.45/349/KUM/2010
2	Puskesmas Anjir Muara	260.412.614,73	593.897.008,25	188.45/258/KUM/2022
3	Puskesmas Anjir Pasar	60.652.185,93	513.565.164,82	188.45/258/KUM/2022
4	Puskesmas Bantuil	10.109.519,02	461.013.665,02	188.45/210/KUM/2023
5	Puskesmas Barambai	2.658.468,45	321.110.562,22	188.45/258/KUM/2022
6	Puskesmas Belawang	111.308.471,68	560.460.417,45	188.45/210/KUM/2023
7	Puskesmas Berangas	598.213.403,86	580.154.382,32	188.45/372/KUM/2019
8	Puskesmas Jejangkit	12.390.285,80	271.648.135,94	188.45/210/KUM /2023
9	Puskesmas Jelapat	143.178.724,19	452.063.838,99	188.45/258/KUM/2022
10	Puskesmas Kuripan	23.125.279,15	323.610.526,44	188.45/210/KUM/2023
11	Puskesmas Lepas	105.266.640,81	467.238.504,87	188.45/210/KUM/2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	SK Pembentukan BLUD
12	Puskesmas Mandastana	69.734.265,24	788.309.750,42	188.45/258/KUM/2022
13	Puskesmas Marabahan	12.182.656,27	336.245.192,95	188.45/605/KUM/2020
14	Puskesmas Mekarsari	0,31	309.454.671,76	188.45/604/KUM/2020
15	Puskesmas Rantau Badauh	35.893.831,19	630.810.777,11	188.45/210/KUM/2023
16	Puskesmas Semangat Dalam	247.764.376,98	493.876.677,09	188.45/255/KUM/2016
17	Puskesmas Tabukan	83.394.501,52	109.619.902,37	188.45/210/KUM/2023
18	Puskesmas Tabunganen	377.880.324,66	880.447.343,41	188.45/258/KUM/2022
19	Puskesmas Tamban	15.713.378,00	475.622.545,86	188.45/256/KUM/2016
20	Puskesmas Wanaraya	36.674.207,92	575.198.610,11	188.45/258/KUM/2022
21	Klinik Utama Setara	298.262.702,25	0,00	188.45/425/KUM/2023
22	UPT Pengolahan Limbah B3 pada Dinas LH	357.430.462,00	381.760.576,00	188.45/674/KUM/2021
	Jumlah Kas di BLUD	9.588.617.202,89	15.373.307.774,71	

Kas di BLUD tahun 2023 diantaranya merupakan Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp6.575.152.525,00.

Rincian Kas di BLUD pada tahun 2024 sebagai berikut.

No	BLUD	Rekening Koran (Rp)	Tunai (Rp)	Total (Rp)
1	RSUD H. Abdul Azis Marabahan	6.726.370.902,93	0,00	6.726.370.902,93
2	Puskesmas Anjir Muara	260.412.614,73	0,00	260.412.614,73
3	Puskesmas Anjir Pasar	60.572.185,93	80.000,00	60.652.185,93
4	Puskesmas Bantuil	10.109.519,02	0,00	10.109.519,02
5	Puskesmas Barambai	2.658.468,45	0,00	2.658.468,45
6	Puskesmas Belawang	111.308.471,68	0,00	111.308.471,68
7	Puskesmas Berangas	595.918.641,86	2.294.762,00	598.213.403,86
8	Puskesmas Jejangkit	12.390.285,80	0,00	12.390.285,80
9	Puskesmas Jelapat	142.531.724,19	647.000,00	143.178.724,19
10	Puskesmas Kuripan	23.125.279,15	0,00	23.125.279,15
11	Puskesmas Lepasan	105.266.640,81	0,00	105.266.640,81
12	Puskesmas Mandastana	69.734.265,24	0,00	69.734.265,24
13	Puskesmas Marabahan	12.182.656,27	0,00	12.182.656,27
14	Puskesmas Mekarsari	0,31	0,00	0,31
15	Puskesmas Rantau Badauh	35.893.831,19	0,00	35.893.831,19
16	Puskesmas Semangat Dalam	247.764.376,98	0,00	247.764.376,98
17	Puskesmas Tabukan	83.379.501,52	15.000,00	83.394.501,52
18	Puskesmas Tabunganen	377.880.324,66	0,00	377.880.324,66
19	Puskesmas Tamban	15.713.378,00	0,00	15.713.378,00
20	Puskesmas Wanaraya	36.071.757,92	602.450,00	36.674.207,92
21	Klinik Utama Setara	298.262.702,25	2.846.000,00	301.108.702,25
22	UPT Pengolahan Limbah B3 pada Dinas LH	354.584.462,00	0,00	354.584.462,00
	Jumlah Kas di BLUD	9.582.131.990,89	6.485.212,00	9.588.617.202,89



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Kas di BLUD dalam bentuk uang tunai merupakan penerimaan tunai tahun 2024 yang belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan BLUD sampai dengan 31 Desember 2024. Penyetoran uang tunai tersebut telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut.

No	BLUD	Tunai (Rp)	Pelaksanaan Penyetoran ke Rekening BLUD
1	Puskesmas Anjir Pasar	80.000,00	06 Januari 2025
2	Puskesmas Berangas	2.294.762,00	Rp295.000,00 : 05 Maret 2025 Rp1.999.762,00 : 07 Maret 2025
3	Puskesmas Jelapat	647.000,00	03 Januari 2025
4	Puskesmas Tabukan	15.000,00	05 Maret 2025
5	Puskesmas Wanaraya	602.450,00	Rp507.764,00 : 07 Januari 2025 Rp94.686,00 : 31 Januari 2025
6	Klinik Utama Setara	2.846.000,00	02 Januari 2025
	Jumlah Kas di BLUD	6.485.212,00	

5.3.1.5 Kas di FKTP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Semua Puskesmas telah berstatus BLUD pada tahun 2023, sehingga tidak ada saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2024.

5.3.1.6 Kas di BOSP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>249.400.748,81</u>	<u>278.655.201,74</u>

Kas di BOSP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp249.400.748,81 dan Rp278.655.201,74. Saldo Kas di BOSP per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp29.254.452,93 atau 10,50% dari saldo Kas di BOSP per 31 Desember 2023. Kas di BOSP terdiri dari Kas di BOS dan Kas di BOP dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
A	Kas dana BOS				
1	Sekolah Dasar	270	182.717.852,00	225.182.649,00	Lampiran 8A
2	Sekolah Menengah Pertama	58	61.206.637,00	49.412.770,00	Lampiran 8B
	Jumlah A	328	243.924.489,00	274.595.419,00	
B	Kas dana BOP				
1	PAUD	28	3.730.323,67	3.173.604,80	Lampiran 9
2	Kesetaraan	1	1.745.936,14	886.177,94	
	Jumlah B	29	5.476.259,81	4.059.782,74	
	Jumlah A & B	357	249.400.748,81	278.655.201,74	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

**5.3.1.7 Kas Dana BOK
Puskesmas**

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

3.888.045.949,00

0,00

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.888.045.949,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.888.045.949,00 atau 100% dari saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Anjir Muara	162.292.723,00	0,00
2	Puskesmas Anjir Pasar	212.797.665,00	0,00
3	Puskesmas Bantuil	186.330.814,00	0,00
4	Puskesmas Barambai	267.203.168,00	0,00
5	Puskesmas Belawang	281.522.803,00	0,00
6	Puskesmas Berangas	174.420.095,00	0,00
7	Puskesmas Jejangkit	150.644.599,00	0,00
8	Puskesmas Jelapat	129.023.475,00	0,00
9	Puskesmas Kuripan	98.295.952,00	0,00
10	Puskesmas Lepasan	286.305.036,00	0,00
11	Puskesmas Mandastana	233.462.017,00	0,00
12	Puskesmas Marabahan	192.307.623,00	0,00
13	Puskesmas Mekarsari	224.428.228,00	0,00
14	Puskesmas Rantau Badauh	141.299.059,00	0,00
15	Puskesmas Semangat Dalam	275.125.706,00	0,00
16	Puskesmas Tabukan	38.081.467,00	0,00
17	Puskesmas Tabunganen	341.643.672,00	0,00
18	Puskesmas Tamban	274.126.668,00	0,00
19	Puskesmas Wanaraya	218.735.179,00	0,00
	Jumlah Kas Dana BOK Puskesmas	3.888.045.949,00	0,00

Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2023 sebesar Rp6.575.152.525,00 masih dicatat sebagai Kas di BLUD.

5.3.1.8 Kas Lainnya

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.1.9 Piutang Pajak

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

12.041.401.349,00

11.505.437.490,00

Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.041.401.349,00 dan Rp11.505.437.490,00. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

2024 mengalami kenaikan sebesar Rp535.963.859,00 atau 4,66% dari saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	21.093.940,00	21.093.940,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.496.662.292,00	1.408.840.653,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.523.645.117,00	10.075.502.897,00
	Jumlah Piutang Pajak Daerah	12.041.401.349,00	11.505.437.490,00

a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.093.940,00 merupakan Piutang Pajak Hotel Prima Batola tahun 2021 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No	Piutang Pajak Hotel	Nilai Piutang (Rp)
1	Tahun 2021	12.778.940,00
2	Tahun 2022	8.315.000,00
	Jumlah	21.093.940,00

b. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2024 dan 2023 telah disetorkan oleh PT PLN ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Nilai Piutang (Rp)	Pelaksanaan Penyetoran ke RKUD
1	Tahun 2023	1.408.840.653,00	17 Januari 2024
2	Tahun 2024	1.496.662.292,00	16 Januari 2025

c. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	10.075.502.897,00
2	Penambahan Piutang dari penetapan tahun 2024	5.211.812.682,00
3	Koreksi Penghapusan Piutang di tahun 2024	(959.504.805,00)
4	Pembayaran Piutang PBB-P2 selama tahun 2024	(3.804.165.657,00)
	Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2024	10.523.645.117,00

Penjelasan mutasi Piutang PBB Pada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

- 1) Saldo Piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.075.502.897,00;
- 2) Penambahan Piutang PBB-P2 selama tahun 2024 sebesar Rp5.211.812.682,00 yang diperoleh dari penetapan PBB-P2 tahun 2024;
- 3) Koreksi nilai penghapusan piutang karena adanya penerimaan piutang atas piutang yang telah dihapus sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/447/KUM/2024 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No	Tahun	Nilai Piutang yang Telah Dihapus (Rp)	Penerimaan Piutang yang Telah Dihapus (Rp)	Koreksi Nilai Penghapusan Piutang (Rp)
1	2017	388.210.475,00	2.078.793,00	386.131.682,00
2	2018	158.102.089,00	438.182,00	157.663.907,00
3	2019	115.092.208,00	104.448,00	114.987.760,00
4	2020	133.229.942,00	175.848,00	133.054.094,00
5	2021	128.921.633,00	153.648,00	128.767.985,00
6	2022	38.968.425,00	69.048,00	38.899.377,00
	Jumlah	962.524.772,00	3.019.967,00	959.504.805,00

- 4) Pembayaran Piutang PBB P2 Tahun 2024 sebesar Rp3.804.165.657,00 sesuai dengan penerimaan di Kas Daerah.
- 5) Sehingga Saldo Akhir Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.523.645.117,00

Rincian Piutang PBB-P2 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.10 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>(5.210.445.125,75)</u>	<u>(4.739.849.758,50)</u>

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.210.445.125,75 dan Rp4.739.849.758,50. Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp470.595.367,25 atau 9,93% dari saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak (Rp)	Piutang Pajak Neto (Rp)
1	Pajak Hotel	21.093.940,00	(10.546.970,00)	10.546.970,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.496.662.292,00	0,00	1.496.662.292,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.523.645.117,00	(5.199.898.155,75)	5.323.746.961,25
	Jumlah	12.041.401.349,00	(5.210.445.125,75)	6.830.956.223,25

Rincian penyisihan piutang per jenis pajak adalah sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang Pajak Hotel

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th)	Diragukan (2 th <P< 5 th)	Macet (5 th < P)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		0%	25%	50%	100%
2021	12.778.940,00	0,00	0,00	12.778.940,00	0,00
2022	8.315.000,00	0,00	0,00	8.315.000,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th)	Diragukan (2 th <P< 5 th)	Macet (5 th < P)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		0%	25%	50%	100%
Jumlah	21.093.940,00	0,00	0,00	21.093.940,00	0,00
Penyisihan	(10.546.970,00)	0,00	0,00	(10.546.970,00)	0,00
Piutang Neto	10.546.970,00	0,00	0,00	10.546.970,00	0,00

b. Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan

Tidak terdapat penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan karena seluruh piutang telah disetorkan oleh PT PLN ke RKUD di awal tahun berikutnya.

c. Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th)	Diragukan (2 th <P< 5 th)	Macet (5 th < P)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		0%	25%	50%	100%
2017	343.100.701,00	0,00	0,00	0,00	343.100.701,00
2018	1.089.218.144,00	0,00	0,00	0,00	1.089.218.144,00
2019	1.176.569.133,00	0,00	0,00	0,00	1.176.569.133,00
2020	1.338.116.971,00	0,00	0,00	1.338.116.971,00	0,00
2021	1.463.689.100,00	0,00	0,00	1.463.689.100,00	0,00
2022	1.613.874.899,00	0,00	0,00	1.613.874.899,00	0,00
2023	1.532.678.771,00	0,00	1.532.678.771,00	0,00	0,00
2024	1.966.397.398,00	1.966.397.398,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.523.645.117,00	1.966.397.398,00	1.532.678.771,00	4.415.680.970,00	2.608.887.978,00
Penyisihan	(5.199.898.155,75)	0,00	(383.169.692,75)	(2.207.840.485,00)	(2.608.887.978,00)
Piutang Neto	5.323.746.961,25	1.966.397.398,00	1.149.509.078,25	2.207.840.485,00	0,00

5.3.1.11 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

60.810.850,00

159.903.244,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.810.850,00 dan Rp159.903.244,00. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp99.092.394,00 atau 61,97% dari saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023. Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	SKPD
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	13.880.000,00	114.510.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	26.517.000,00	26.517.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	SKPD
3	Retribusi Pemakaian Ruang	338.850,00	0,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	560.000,00	0,00	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	0,00	Dinas Perhubungan
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.215.000,00	0,00	Dinas Perhubungan
7	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	300.000,00	0,00	Dinas Perhubungan
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	18.876.244,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Piutang Retribusi	60.810.850,00	159.903.244,00	

a. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.880.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai (Rp)
1	PT. Indosat	30 September 2020	6.940.000,00
2	PT. Indosat	14 Juni 2021	6.940.000,00
	Jumlah		13.880.000,00

b. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Pasar Marabahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.517.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Los Pasar Marabahan	939.000,00
2	Kios Pasar Sebelah Barat	13.848.000,00
3	Kios Pasar Sebelah Timur	6.420.000,00
4	Kios Dermaga Kuliner	5.310.000,00
	Jumlah	26.517.000,00

c. Piutang Retribusi Pemakaian Ruang

Piutang Retribusi Pemakaian Ruang per 31 Desember 2024 sebesar Rp338.850,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nama Wajib Retribusi	Nilai (Rp)
1	Gudang SRG Mandastana	Wirtono	51.300,00
2	Gudang SRG Anjir Muara	Ikhsan Purwanto	287.550,00
	Jumlah		338.850,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

d. Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 sebesar Rp560.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Wajib Retribusi	Nilai (Rp)
1	Wahidah	160.000,00
2	Syahrani	400.000,00
	Jumlah	560.000,00

e. Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor berupa pemakaian kendaraan bermotor oleh empat wajib retribusi pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.000.000,00.

No	Nama Wajib Retribusi	Nilai (Rp)
1	Djunaidi	1.200.000,00
2	Djunaidi	7.200.000,00
3	Agus Susilo Sudarman, S.AP	7.200.000,00
4	Birhansyah	2.100.000,00
5	Basrani	300.000,00
	Jumlah	18.000.000,00

f. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 bersumber dari wajib retribusi a.n. Arifin Noor sebesar Rp1.215.000,00.

g. Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 bersumber dari wajib retribusi a.n. Indat sebesar Rp300.000,00.

h. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung.

5.3.1.12 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>(18.833.500,00)</u>	<u>(10.169.250,00)</u>

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.833.500,00 dan Rp10.169.250,00. Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.664.250,00 atau 85,20% dari saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Piutang Retribusi (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi (Rp)	Piutang Retribusi Neto (Rp)
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	13.880.000,00	(6.940.000,00)	6.940.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	26.517.000,00	(11.593.500,00)	14.923.500,00
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	338.850,00	0,00	338.850,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	560.000,00	0,00	560.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	(300.000,00)	17.700.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
7	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	300.000,00	0,00	300.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	60.810.850,00	(18.833.500,00)	41.977.350,00

Rincian penyisihan piutang per jenis retribusi adalah sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P < 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P < 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2020	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00
2021	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00
Jumlah	13.880.000,00	0,00	0,00	13.880.000,00	0,00
Penyisihan	(6.940.000,00)	0,00	0,00	(6.940.000,00)	0,00
Piutang Neto	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00

b. Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P < 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P < 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2022	19.857.000,00	0,00	0,00	19.857.000,00	0,00
2023	6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	0,00	0,00
Jumlah	26.517.000,00	0,00	6.660.000,00	19.857.000,00	0,00
Penyisihan	(11.593.500,00)	0,00	(1.665.000,00)	(9.928.500,00)	0,00
Piutang Neto	14.923.500,00	0,00	4.995.000,00	9.928.500,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

c. Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P< 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2024	338.850,00	338.850,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	338.850,00	338.850,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Neto	338.850,00	338.850,00	0,00	0,00	0,00

d. Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P< 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2024	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Neto	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00

e. Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P< 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2023	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2024	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	18.000.000,00	16.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Penyisihan	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00
Piutang Neto	17.700.000,00	16.800.000,00	900.000,00	0,00	0,00

f. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P< 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2024	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Neto	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

g. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P< 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2024	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Neto	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

h. Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung

Tidak terdapat Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung karena tidak terdapat saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2024.

5.3.1.13 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	4.668.968.186,17	2.190.711.875,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.668.968.186,17 dan Rp2.190.711.875,00. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.478.256.311,17 atau 113,13% dari saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	3.854.255.578,21	2.045.399.465,00
2	DPUPR	776.099.316,88	0,00
3	Disperkim	38.613.291,08	0,00
4	Puskesmas Anjir Muara	0,00	16.184.649,00
5	Puskesmas Anjir Pasar	0,00	0,00
6	Puskesmas Bantuil	0,00	3.385.000,00
7	Puskesmas Barambai	0,00	0,00
8	Puskesmas Belawang	0,00	0,00
9	Puskesmas Berangas	0,00	0,00
10	Puskesmas Jejangkit	0,00	0,00
11	Puskesmas Jelapat	0,00	5.400.000,00
12	Puskesmas Kuripan	0,00	25.596,00
13	Puskesmas Lepas	0,00	15.250.000,00
14	Puskesmas Mandastana	0,00	14.580.000,00
15	Puskesmas Marabahan	0,00	0,00
16	Puskesmas Mekarsari	0,00	32.970.756,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
17	Puskesmas Rantau Badauh	0,00	7.605.000,00
18	Puskesmas Semangat Dalam	0,00	0,00
19	Puskesmas Tabukan	0,00	42.850.000,00
20	Puskesmas Tabunganen	0,00	71.409,00
21	Puskesmas Tamban	0,00	6.990.000,00
22	Puskesmas Wanaraya	0,00	0,00
23	Klinik Utama Setara	0,00	0,00
24	UPT Pengolahan Limbah	0,00	0,00
	Jumlah Piutang BLUD	4.668.968.186,17	2.190.711.875,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

- RSUD H. Abdul Aziz Marabahan merupakan piutang yang berasal dari pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS periode November dan Desember 2024 dan piutang yang berasal dari Pihak Ketiga atas kekurangan Volume Pekerjaan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp132.360.678,21 pada tahun 2024.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan piutang yang berasal dari Pihak Ketiga atas kekurangan Volume pekerjaan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp311.889.278,35 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp464.210.038,53 pada tahun 2024.
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan piutang yang berasal dari Pihak Ketiga atas Kekurangan Volume pekerjaan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp38.613.291,08 pada tahun 2024.

5.3.1.14 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 karena masih termasuk dalam kategori lancar.

5.3.1.15 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>271.680.320.520,00</u>	<u>4.520,00</u>

Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp271.680.320.520,00 dan Rp4.520,00. Saldo Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp271.680.316.000,00 atau 6.010.626.460,18% dari saldo Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023. Rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Penghasilan	2.545.113.760,00	760,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2	PBB	23.745.386.000,00	0,00
3	Cukai Hasil Tembakau	810,00	810,00
4	SDA Migas	645,00	645,00
5	SDA Minerba	245.388.907.814,00	814,00
6	SDA Kehutanan – PSDH	911.491,00	1.491,00
	Jumlah	271.680.320.520,00	4.520,00

Peraturan yang menjadi acuan pengakuan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

5.3.1.16 Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 karena masih termasuk dalam kategori lancar.

5.3.1.17 Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>35.656.446.607,00</u>	<u>37.323.396.956,00</u>

Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan piutang pendapatan bagi hasil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp35.656.446.607,00 dan Rp37.323.396.956,00. Saldo Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.666.950.349,00 atau 4,47% dari saldo Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023. Rincian Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.968.479.450,00	2.441.896.214,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.809.324.227,00	2.822.714.062,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.016.495.901,00	29.105.063.672,00
4	Pajak Air Permukaan	40.490.313,00	89.181.114,00
5	Pajak Rokok	2.821.656.716,00	2.864.541.894,00
	Jumlah	35.656.446.607,00	37.323.396.956,00

Peraturan yang menjadi acuan pengakuan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah

- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01004/KUM/2024, tanggal 22 Nopember 2024 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2024; dan

- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0130/KUM/2025, tanggal 13 Februari 2025 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2024.

5.3.1.18 Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 karena masih termasuk dalam kategori lancar.

5.3.1.19 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	32.967.000,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp32.967.000,00 atau tidak terdapat penerimaan angsuran atas penjualan Kendaraan Toyota Kijang KF 80 dengan nomor polisi DA 27 M selama tahun 2024. Piutang tersebut sudah ada lebih dari lima tahun atas nama Drs. M. Aris Kartadipura sehingga di reklasifikasi ke Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran.

5.3.1.20 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	(32.967.000,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp32.967.000,00.

5.3.1.21 Piutang Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	7.637.472.900,00	7.584.953.900,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.637.472.900,00 dan Rp7.584.953.900,00. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.519.000,00 atau 0,69% dari saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023. Piutang Lainnya merupakan pemberian pinjaman kepada KUD untuk pembelian pupuk bersubsidi yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

No	KUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	KUD Hidup Bersama	228.329.900,00	228.329.900,00
2	KUD Daya Guna	1.067.983.000,00	1.109.920.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	KUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3	KUD Padi Utama	354.236.750,00	354.236.750,00
4	KUD Tani Sepakat	292.507.000,00	292.507.000,00
5	KUD Tuntung Pandang	481.058.000,00	481.058.000,00
6	KUD Basunondo	299.638.100,00	222.243.100,00
7	KUD Dwi Karya	281.020.350,00	281.020.350,00
8	KSU Kencana Makmur	20.690.000,00	20.300.000,00
9	KJKS Bersatu Membangun	558.279.000,00	558.279.000,00
10	KUD Jujur Usaha	891.028.750,00	891.028.750,00
11	KJKS BMT Nurul Madani	92.080.000,00	92.080.000,00
12	KSU Harapan Sejahtera	95.372.050,00	89.034.050,00
13	Koptan Ganang Banua	1.999.679.000,00	1.999.679.000,00
14	KUD Gawi Sabumi	238.266.000,00	238.266.000,00
15	KUD Karya Bersama	109.554.500,00	105.904.500,00
16	KUD Kenanga	208.904.500,00	178.586.500,00
17	PD PBR	418.846.000,00	442.481.000,00
	Jumlah Piutang Lainnya	7.637.472.900,00	7.584.953.900,00

5.3.1.22 Penyisihan Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(6.653.221.275,00)	(6.313.883.325,00)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.653.221.275,00 dan Rp6.313.883.325,00. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp339.337.950,00 atau 5,37% dari saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th)	Diragukan (2 th <P< 5 th)	Macet (5 th < P)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		0%	25%	50%	100%
2008	71.029.400,00	0,00	0,00	0,00	71.029.400,00
2009	49.525.500,00	0,00	0,00	0,00	49.525.500,00
2010	116.447.000,00	0,00	0,00	0,00	116.447.000,00
2011	506.275.500,00	0,00	0,00	0,00	506.275.500,00
2012	823.467.500,00	0,00	0,00	0,00	823.467.500,00
2013	1.425.073.500,00	0,00	0,00	0,00	1.425.073.500,00
2014	1.820.577.600,00	0,00	0,00	0,00	1.820.577.600,00
2015	424.973.200,00	0,00	0,00	0,00	424.973.200,00
2016	406.283.900,00	0,00	0,00	0,00	406.283.900,00
2017	148.658.000,00	0,00	0,00	0,00	148.658.000,00
2018	213.292.500,00	0,00	0,00	0,00	213.292.500,00
2019	178.824.000,00	0,00	0,00	0,00	178.824.000,00
2020	79.710.000,00	0,00	0,00	79.710.000,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P< 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2021	103.125.500,00	0,00	0,00	103.125.500,00	0,00
2022	479.089.900,00	0,00	0,00	479.089.900,00	0,00
2023	551.323.900,00	0,00	551.323.900,00	0,00	0,00
2024	239.796.000,00	239.796.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.637.472.900,00	239.796.000,00	551.323.900,00	661.925.400,00	6.184.427.600,00
Penyisihan	(6.653.221.275,00)	0,00	(137.830.975,00)	(330.962.700,00)	(6.184.427.600,00)
Piutang Neto	984.251.625,00	239.796.000,00	413.492.925,00	330.962.700,00	0,00

Rincian Piutang Lainnya dan penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.23 Persediaan	12.401.628.217,46	12.625.022.472,82

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.401.628.217,46 dan Rp12.625.022.472,82. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp201.705.872,86 atau 1,60% dari saldo Persediaan per 31 Desember 2023. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	668.500,00	900.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	101.016.000,00	162.943.600,00
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.985.000,00	36.238.912,50
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	184.732.250,00	294.594.345,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	23.847.360,00	564.243.309,96
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	501.778.993,32	1.720.500,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	121.000,00	0,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.550.530,00	14.732.290,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	5.003.710,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	645.000,00	426.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	138.600.000,00	0,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.143.500,00	11.053.670,00
13	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.333.827.248,73	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
14	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.177.434.055,41	10.657.500.334,36
15	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	69.425.194,00	264.787.147,00
16	Belanja Natura dan Pakan-Natura	834.466.286,00	605.977.154,00
17	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	5.730.800,00	4.901.500,00
18	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	656.500,00	0,00
	Jumlah Persediaan	12.401.628.217,46	12.625.022.472,82

Rincian Persediaan per jenis persediaan untuk tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 tidak termasuk persediaan yang kedaluwarsa/rusak ataupun yang akan dihapus dengan uraian sebagai berikut.

No	SKPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan (IFK)	Obat-Obatan	455.330.181,00
2	RSUD H. Abdul Aziz	Obat-Obatan	51.817.033,16
		Jumlah	507.147.214,16

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2 Investasi Jangka Panjang	<u><u>161.487.539.314,35</u></u>	<u><u>164.748.664.142,45</u></u>

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp161.487.539.314,35 dan Rp164.748.664.142,45. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.261.124.828,10 atau 1,98% dari saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	161.487.539.314,35	164.748.664.142,45
	Jumlah	161.487.539.314,35	164.748.664.142,45

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	<u><u>161.487.539.314,35</u></u>	<u><u>164.748.664.142,45</u></u>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Investasi Jangka Panjang Permanen pada Badan Usaha Milik Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp161.487.539.314,35 dan Rp164.748.664.142,45. Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.261.124.828,10 atau 1,98% dari saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	BUMD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT Bank Kalsel	107.500.000.000,00	107.500.000.000,00
2	PT BPR Tapin Sejahtera	3.408.100.000,00	4.310.085.920,23
3	PDAM Barito Kuala	47.218.220.843,35	48.756.113.239,22
4	PD Aneka Usaha Selidah	1.371.076.873,00	1.717.723.645,00
5	PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	1.990.141.598,00	2.464.741.338,00
	Jumlah	161.487.539.314,35	164.748.664.142,45

Untuk masing-masing penyertaan modal ke BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Kalsel sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp107.500.000.000,00. Pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Kalsel menggunakan metode biaya.

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan pada tanggal 31 Januari 2024 Nomor 26, Bank Kalsel telah memberikan dividen tunai sebesar Rp11.010.547.184,00 yang ditransfer pada tanggal 02 Februari 2024 dan telah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- b. Perusahaan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Batola (PT BPR Batola) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2008. Dalam rangka memperluas jaringan dan jangkauan pasar, meningkatkan layanan dan pengembangan strategis bisnis berkelanjutan, PT BPR Batola (berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala) telah bergabung ke dalam PT BPR Tapin Sejahtera (berkedudukan di Kabupaten Tapin). Adapun landasan hukumnya adalah:
 - 1) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Batola tanggal 30 Oktober 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Tapin sejahtera tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 22 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Nur Kamila Ramadhaniati, SH. M.Kn., yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI Nomor AHU-0025102.AH.01.10. Tahun 2024 tanggal 26 November 2024;
 - 2) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-94/D.03/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Batola ke dalam PT BPR Tapin Sejahtera;
 - 3) Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Tapin sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 23 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Nur Kamila Ramadhaniati, SH.M.Kn., yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI Nomor AHU-0256569.AH.01.11 tahun 2024 tanggal 26 November 2024.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Sejak tanggal efektif penggabungan yaitu 1 Desember 2024, seluruh aset, liabilitas dan ekuitas, operasional, produk, dan layanan PT BPR Batola beralih karena hukum kepada PT BPR Tapin Sejahtera. Dan selanjutnya status badan hukum PT BPR Batola berakhir karena hukum.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada PT BPR Tapin Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.408.100.000,00. Pencatatan atas penyertaan modal kepada PT BPR Tapin Sejahtera menggunakan metode biaya. Hal ini terjadi karena sejak berubah status badan hukum PT BPR Tapin Sejahtera dan bergabungnya PT BPR Batola, berdampak pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batola mengalami penyesuaian sesuai komposisi saham yang berlaku pada PT BPR Tapin Sejahtera sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Tapin Sejahtera. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batola pada PT BPR Tapin Sejahtera dikomversi dari 93,46 % menjadi 16,79%, dengan komposisi saham sebagai berikut:

- PT BPR Tapin Sejahtera sebesar 216.641 lembar saham dengan nominal saham Rp10.832.050.000,00
- Pemerintah Kabupaten Batola sebesar 68.162 lembar saham dengan nominal saham Rp3.408.100.000,00
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12.736 lembar saham dengan nominal saham Rp5.636.800.000,00

Berdasarkan data nilai saham seluruhnya, kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batola pada PT BPR Tapin Sejahtera sebesar 16,79% kurang dari 20%, dan Pemerintah Kabupaten Batola tidak sebagai pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi, sehingga metode akuntansi yang digunakan dalam perhitungan nilai investasi menggunakan metode biaya.

- c. PDAM Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala. Persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di PDAM Kabupaten Barito Kuala sebesar 86,37%. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 mencatat nilai investasi pada PDAM Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan metode ekuitas. Laporan Keuangan PDAM Tahun 2024 telah diaudit oleh KAP Drs. Fahmi Rizani & Rekan
- d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah (PD AUS) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2000 tanggal 6 September 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah. Persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di PD AUS sebesar 100,00%. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mencatat investasi pada PD AUS dengan menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai investasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah sama dengan ekuitas bersih PD AUS yaitu sebesar Rp1.388.800.269,00 (Laporan Keuangan *Anaudited* PD AUS) Tahun 2024.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PD PBKM) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada PD PBKM sebesar 100,00%. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mencatat investasi pada PD PBKM dengan menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai investasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah sama dengan ekuitas bersih PD PBKM yaitu sebesar Rp895.792.056,00. (Laporan Keuangan *Anaudited* PD PBKM) Tahun 2024.

PD PBKM pada tahun 2024 memberikan dividen tunai yang ditransfer dalam dua tahap dengan total transfer sebesar Rp505.750.000,00 sehingga menjadi pengurang nilai investasi menjadi sebesar Rp1.990.141.598,00. Atas pembagian dividen telah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah – Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

5.3.3 Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.580.044.381.535,70</u>	<u>2.163.690.083.538,32</u>

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.580.044.381.535,70 dan Rp2.163.690.083.538,32. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp416.353.807.000,38 atau 19,24% dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	424.394.353.560,27	399.976.090.787,27
2	Peralatan dan Mesin	598.807.899.775,85	556.017.414.990,93
3	Gedung dan Bangunan	1.439.189.313.383,24	1.290.463.639.345,83
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.616.689.281.649,86	2.399.439.033.795,22
5	Aset Tetap Lainnya	46.127.964.454,06	45.715.886.569,06
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.773.931.845,95	34.653.116.331,95
7	Akumulasi Penyusutan	(2.567.938.363.133,53)	(2.562.575.098.281,94)
	Jumlah Aset Tetap	2.580.044.381.535,70	2.163.690.083.538,32

Rincian Aset Tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.3.1 Aset Tetap – Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>424.394.353.560,27</u>	<u>399.976.090.787,27</u>

Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp424.394.353.560,27 dan Rp399.976.090.787,27. Saldo Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.418.262.773,00 atau 6,10% dari saldo Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2023. Daftar rincian Aset Tetap – Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2024 merupakan hasil rekonsiliasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Barito Kuala. Rincian mutasi Aset Tetap – Tanah adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1. Saldo Awal	399.976.090.787,27	369.175.562.414,27	
2. Mutasi Penambahan			
a. Pembelian dari APBD	8.641.969.686,00	1.764.136.373,00	Lampiran 15
b. Koreksi	0,00	85.185.000,00	---
c. Hibah	15.989.142.600,00	29.027.815.000,00	Lampiran 16
d. Reklasifikasi	0,00	0,00	---
e. Mutasi antar SKPD	110.210.000,00	100.250.000,00	Diskoperindag
Jumlah Mutasi Penambahan	24.741.322.286,00	30.977.386.373,00	
3. Mutasi Pengurangan			
a. Hibah	(72.000.000,00)	(0,00)	Disperkim
b. Koreksi	(0,00)	(0,00)	---
c. Reklasifikasi	(140.849.513,00)	(76.608.000,00)	BPBD
d. Aset Ekstrakomtable	(0,00)	(0,00)	---
e. Penghapusan	(0,00)	(0,00)	---
f. Mutasi antar SKPD	(110.210.000,00)	(100.250.000,00)	Dinas Kesehatan
Jumlah Mutasi Pengurangan	(323.059.513,00)	(176.858.000,00)	
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	424.394.353.560,27	399.976.090.787,27	

5.3.3.2 Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	598.807.899.775,85	556.017.414.990,93

Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp598.807.899.775,85 dan Rp556.017.414.990,93. Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 42.790.484.784,92 atau 7,70% dari saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023. Daftar rincian mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 merupakan hasil rekonsiliasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Barito Kuala. Rincian mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1. Saldo Awal	556.017.414.990,93	497.810.404.332,55	
2. Mutasi Penambahan			
a. Pembelian dari APBD	45.482.320.204,00	61.730.827.143,00	Lampiran 18
b. Hibah	216.750.000,00	511.420.500,00	Lampiran 19
c. Koreksi	275.057.662,98	641.156.200,00	Lampiran 20



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
d. Reklasifikasi	1.746.616.353,75	1.591.456.227,00	DPUPR dan Disbunak
e. Mutasi antar SKPD	3.281.355.834,16	432.476.262,22	Lampiran 21
Jumlah Mutasi Penambahan	51.002.100.054,89	64.907.336.332,22	
3. Mutasi Pengurangan			
a. Hibah	(2.777.749.955,77)	(575.811.718,33)	Lampiran 22
b. Koreksi	(11.880.300,00)	(69.050.000,00)	Lampiran 23
c. Reklasifikasi	(356.081.486,04)	(1.829.058.402,29)	Lampiran 24
d. Aset Ekstrakomtable	(223.127.194,00)	(3.593.129.291,00)	Lampiran 25
e. Penghapusan	(2.040.728.000,00)	(200.800.000,00)	Lampiran 26
f. Mutasi antar SKPD	(2.802.048.334,16)	(432.476.262,22)	Lampiran 27
Jumlah Mutasi Pengurangan	(8.211.615.269,97)	(6.700.325.673,84)	
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	598.807.899.775,85	556.017.414.990,93	

**5.3.3.3 Aset Tetap – Gedung
dan Bangunan**

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>1.439.189.313.383,24</u>	<u>1.290.463.639.345,83</u>

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.439.189.313.383,24 dan Rp1.290.463.639.345,83. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp148.725.674.037,41 atau 11,52% dari saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023. Daftar rincian mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 merupakan hasil rekonsiliasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Barito Kuala. Rincian mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1. Saldo Awal	1.290.463.639.345,83	1.219.723.350.038,96	
2. Mutasi Penambahan			
a. Pembelian dari APBD	142.482.443.020,00	101.496.171.237,00	Lampiran 29
b. Hibah	0,00	0,00	---
c. Koreksi	6.248.377.235,80	2.470.546.532,00	Lampiran 30
d. Reklasifikasi	26.733.309.405,00	876.858.834,00	Lampiran 31
e. Mutasi antar SKPD	49.239.141.866,00	11.346.199.111,00	Lampiran 32
Jumlah Mutasi Penambahan	224.703.271.526,80	116.189.775.714,00	
3. Mutasi Pengurangan			
a. Hibah	(5.244.009.691,83)	(0,00)	Lampiran 33
b. Koreksi	(0,00)	(34.204.500,00)	---
c. Reklasifikasi	(21.494.445.931,56)	(33.881.149.610,13)	Lampiran 34
d. Aset Ekstrakomtable	(0,00)	(0,00)	---



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
e. Penghapusan	(0,00)	(187.933.186,00)	---
f. Mutasi antar SKPD	(49.239.141.866,00)	(11.346.199.111,00)	Lampiran 35
Jumlah Mutasi Pengurangan	(75.977.597.489,39)	(45.449.486.407,13)	
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	1.439.189.313.383,24	1.290.463.639.345,83	

5.3.3.4 Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	2.616.689.281.649,86	2.399.439.033.795,22

Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.616.689.281.649,86 dan Rp2.399.439.033.795,22. Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp217.250.247.854,64 atau 9,05% dari saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023. Daftar rincian mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 merupakan hasil rekonsiliasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Barito Kuala. Rincian mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1. Saldo Awal	2.399.439.033.795,22	2.202.203.455.855,92	
2. Mutasi Penambahan			
a. Pembelian dari APBD	208.499.077.592,00	151.926.623.257,00	Lampiran 37
b. Hibah	4.046.946.570,00	19.834.733.095,30	Disperkim
c. Koreksi	0,00	158.590.800,00	---
d. Reklasifikasi	7.599.369.285,00	30.978.487.314,00	DPUPR dan Dinkes
e. Mutasi antar SKPD	19.668.512.907,18	23.179.448.308,74	Lampiran 38
Jumlah Mutasi Penambahan	239.813.906.354,18	226.077.882.775,04	
3. Mutasi Pengurangan			
a. Hibah	(0,00)	(0,00)	---
b. Koreksi	(0,00)	(0,00)	---
c. Reklasifikasi	(2.895.145.592,36)	(5.662.856.527,00)	Lampiran 39
d. Aset Ekstrakomtable	(0,00)	(0,00)	---
e. Penghapusan	(0,00)	(0,00)	---
f. Mutasi antar SKPD	(19.668.512.907,18)	(23.179.448.308,74)	Lampiran 40
Jumlah Mutasi Pengurangan	(22.563.658.499,54)	(28.842.304.835,74)	
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	2.616.689.281.649,86	2.399.439.033.795,22	

5.3.3.5 Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

46.127.964.454,06

45.715.886.569,06

Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.127.964.454,06 dan Rp45.715.886.569,06. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp412.077.885,00 atau 0,90% dari saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023. Daftar rincian mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan hasil rekonsiliasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Barito Kuala. Rincian mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1. Saldo Awal	45.715.886.569,06	45.545.314.169,06	
2. Mutasi Penambahan			
a. Pembelian dari APBD	423.108.025,00	1.019.078.919,00	Lampiran 42
b. Hibah	0,00	28.790.200,00	---
c. Koreksi	0,00	0,00	---
d. Reklasifikasi	99.746.800,00	49.303.900,00	DPUPR
e. Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	---
Jumlah Mutasi Penambahan	522.854.825,00	1.097.173.019,00	
3. Mutasi Pengurangan			
a. Hibah	(0,00)	(0,00)	---
b. Koreksi	(0,00)	(2.500.000,00)	---
c. Reklasifikasi	(110.776.940,00)	(643.557.719,00)	DKPP dan Disperpusip
d. Aset Ekstrakomtable	(0,00)	(280.542.900,00)	---
e. Penghapusan	(0,00)	(0,00)	---
f. Mutasi antar SKPD	(0,00)	(0,00)	---
Jumlah Mutasi Pengurangan	(110.776.940,00)	(926.600.619,00)	
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	46.127.964.454,06	45.715.886.569,06	

5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

**31 Desember 2024
(Rp)**

22.773.931.845,95

**31 Desember 2023
(Rp)**

34.653.116.331,95

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.773.931.845,95 dan Rp34.653.116.331,95. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.879.184.486,00 atau 34,28% dari saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023. Daftar rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 43**.

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1. Saldo Awal	34.653.116.331,95	29.989.233.670,95	
2. Mutasi Penambahan			
a. Pembelian dari APBD	0,00	0,00	---
b. Hibah	0,00	0,00	---
c. Koreksi	19.310.670,00	0,00	Bappelitbang
d. Reklasifikasi	18.521.111.356,00	28.877.758.151,00	Lampiran 44
e. Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	---
Jumlah Mutasi Penambahan	18.540.422.026,00	28.877.758.151,00	
3. Mutasi Pengurangan			
a. Hibah	(0,00)	(0,00)	---
b. Koreksi	(0,00)	(0,00)	---
c. Reklasifikasi	(30.419.606.512,00)	(24.213.875.490,00)	Lampiran 45
d. Aset Ekstrakomtable	(0,00)	(0,00)	---
e. Penghapusan	(0,00)	(0,00)	---
f. Mutasi antar SKPD	(0,00)	(0,00)	---
Jumlah Mutasi Pengurangan	(30.419.606.512,00)	(24.213.875.490,00)	
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	22.773.931.845,95	34.653.116.331,95	

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(2.567.938.363.133,53)	(2.562.575.098.281,94)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp2.567.938.363.133,53) dan (Rp2.562.575.098.281,94). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.363.755.818,59 atau 0,21% dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(456.571.237.271,44)	(399.839.874.689,65)
3	Gedung dan Bangunan	(423.150.035.433,64)	(438.790.526.834,18)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.684.673.662.891,91)	(1.722.961.956.562,11)
5	Aset Tetap Lainnya	(3.543.427.536,54)	(982.740.196,00)
	Jumlah Penyusutan Aset Tetap	(2.567.938.363.133,53)	(2.562.575.098.281,94)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 46**.

5.3.4 Dana Cadangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

0,00

0,00

Saldo Tagihan Dana Cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

5.3.5 Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>71.690.089.237,90</u>	<u>291.422.096.998,67</u>

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp71.690.089.237,90 dan Rp291.422.096.998,67. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp219.732.007.760,77 atau 75,40% dari saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Aset Lainnya - Neto	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	2.495.513.023,17	2.495.513.023,17
4	Aset Tidak Berwujud (Neto)	4.767.559.562,36	9.824.341.871,10
5	Aset Lain-Lain (Neto)	31.428.916.652,37	40.191.607.104,40
6	Treasury Deposit Facility	32.998.100.000,00	238.910.635.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	71.690.089.237,90	291.422.096.998,67

5.3.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>32.967.000,00</u>	<u>0,00</u>

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.967.000,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi dari Aset Lancar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

5.3.5.2 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>Rp32.967.000,00</u>	<u>(32.967.000,00)</u>

Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.967.000,00 dan Rp0,00. Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi dari Aset Lancar Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dengan rincian sebagai berikut.

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P< 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Lancar (P < 1 th) (Rp)	Kurang lancar (1 th <P< 2 th) (Rp)	Diragukan (2 th <P< 5 th) (Rp)	Macet (5 th < P) (Rp)
		0%	25%	50%	100%
2004	32.967.000,00	0,00	0,00	0,00	32.967.000,00
Jumlah	32.967.000,00	0,00	0,00	0,00	32.967.000,00
Penyisihan	(32.967.000,00)	0,00	0,00	0,00	(32.967.000,00)
Jlh Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.5.3 Tuntutan Perbendaharaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

5.3.5.4 Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u><u>2.495.513.023,17</u></u>	<u><u>2.495.513.023,17</u></u>

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.495.513.023,17 dan Rp2.495.513.023,17. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Peningkatan nilai Tuntutan Ganti Rugi di Tahun 2024 merupakan kasus Tuntutan Ganti Rugi yang berstatus sudah penetapan dan dimuat dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No	Tahun Kejadian	Jumlah Penanggung Jawab	Nilai (Rp)
1	2006	14	311.997.500,00
2	2007	53	1.205.686.418,00
3	2008	19	234.726.349,00
4	2009	1	1.237.705,00
5	2012	2	4.494.950,41
6	2013	2	13.787.847,00
7	2014	5	19.676.203,67
8	2018	1	9.346.300,00
9	2019	2	694.559.750,09
	Jumlah	99	2.495.513.023,17

Rincian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

5.3.5.5 Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u><u>26.946.451.887,00</u></u>	<u><u>23.179.861.557,00</u></u>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26.946.451.887,00 dan Rp23.179.861.557,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.766.590.330,00 atau 16,25% dari saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Perangkat Lunak	3.586.798.699,00	3.717.652.139,00
2	Lisensi	334.787.140,00	224.837.200,00
3p	Kajian (DED)	23.024.866.048,00	19.237.372.218,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud	26.946.451.887,00	23.179.861.557,00

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 48**. Daftar rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 49**.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1. Saldo Awal	23.179.861.557,00	22.545.288.048,00	
2. Mutasi Penambahan			
a. Pembelian dari APBD	4.106.690.390,00	1.543.250.092,00	Lampiran 50
b. Hibah	0,00	0,00	---
c. Koreksi	49.950.000,00	0,00	Set. DPRD
d. Reklasifikasi	109.949.940,00	449.783.719,00	Disperpusip
e. Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	---
Jumlah Mutasi Penambahan	4.266.590.330,00	1.993.033.811,00	
3. Mutasi Pengurangan			
a. Hibah	(0,00)	(0,00)	---
b. Koreksi	(0,00)	(0,00)	---
c. Reklasifikasi	(500.000.000,00)	(1.358.460.302,00)	DPUPR
d. Aset Ekstrakomtable	(0,00)	(0,00)	---
e. Penghapusan	(0,00)	(0,00)	---
f. Mutasi antar SKPD	(0,00)	(0,00)	---
Jumlah Mutasi Pengurangan	(500.000.000,00)	(1.358.460.302,00)	
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	26.946.451.887,00	23.179.861.557,00	

5.3.5.6 Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(22.178.892.324,64)	(13.355.519.685,90)

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp22.178.892.324,64) dan (Rp13.355.519.685,90). Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.823.372.638,74 atau 66,07% dari saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Lisensi	(186.146.652,50)	(127.022.200,00)
2	Perangkat Lunas	(1.824.316.620,55)	(4.685.110.371,90)
3	Hak Cipta	0,00	0,00
4	Kajian (DED)	(20.164.639.651,59)	(8.543.387.114,00)
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	(3.789.400,00)	0,00
	Jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud	(22.178.892.324,64)	(13.355.519.685,90)

Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 51**.

5.3.5.7 Aset Lain-Lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>100.752.094.973,69</u>	<u>115.285.433.493,27</u>

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp100.752.094.973,69 dan Rp115.285.433.493,27. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.533.338.519,58 atau 12,61% dari saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Aset Lain-Lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2017	802.922.223,00	802.922.223,00
2	Reklas dari Investasi Non Permanen	387.833.000,00	387.833.000,00
3	Reklas Aset Tetap yang rusak berat dan/atau tidak ditemukan	98.606.986.464,52	114.087.398.270,27
4	Penyertaan modal berupa tanah kepada PDAM yang belum dicatat pada LK PDAM	7.280.000,00	7.280.000,00
5	Reklas Aset Tetap yang kekurangan Volume Pekerjaan	947.073.286,17	0,00
	Jumlah Aset Lain-Lain	100.752.094.973,69	115.285.433.493,27

Rincian Aset Lain-Lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 52**.

a. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2017

Hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tercantum dalam LHP Nomor 700/040-Irban III/kasus/Disporabudpar/Inspt tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp54.022.000,00. Hasil pemeriksaan tersebut belum diterbitkan SK Pembebanan TGR-nya dan selama tahun 2024 tidak terdapat penyeteroran dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga atas hasil pemeriksaan tersebut. Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdapat Pembebanan Kerugian Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan BPK berdasarkan SK Bupati 188.45/113/KUM/2015 sebesar Rp553.495.623,00. Pada Dinas Sekretariat DPRD terdapat Aset Lain-Lain (Pajak Rumah Makan/Warung Makan yg tidak tertagih dari BPKAD TA 2014) sebesar Rp195.404.600,00.

b. Reklas dari Investasi Non Permanen



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Reklas dari Investasi Non Permanen ini belum memperoleh SK Penghapusan dari Tim TP-TGR dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Perkebunan Peternakan	0,00	0,00
2	Dinas Koperindag (Dana Bergulir Pupuk)	8.333.000,00	8.333.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan (Dana Bergulir Lumbung Pangan)	379.500.000,00	379.500.000,00
	Jumlah	387.833.000,00	387.833.000,00

c. Reklas Aset Tetap yang Rusak Berat dan/atau Tidak Ditemukan

No	Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	309.422.000,00	309.422.000,00
2	Peralatan dan Mesin	68.365.323.149,99	77.757.109.407,13
3	Gedung dan Bangunan	13.026.701.059,40	13.656.937.963,01
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.020.549.025,47	21.192.484.745,47
5	Aset Tetap Lainnya	884.991.229,66	1.171.444.154,66
	Jumlah	98.606.986.464,52	114.087.398.270,27

Rincian reklas aset tetap yang rusak berat dan/atau tidak ditemukan sebesar Rp98.606.986.464,52 dapat dilihat pada **Lampiran 53**.

d. Penyertaan modal berupa tanah kepada PDAM yang belum dicatat pada LK PDAM

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menyerahkan aset tetap tanah sebagai penyertaan modal kepada PDAM Barito Kuala sesuai dengan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/254/KUM/2022 tentang Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD Berupa Tanah pada PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 sebesar Rp7.280.000,00. Atas penyertaan modal tersebut, PDAM Barito Kuala belum mencatat dalam LK PDAM Barito Kuala Tahun Buku 2024.

Melalui surat Nomor 539.05/PDAM.BK/IV/2023 Direktur PDAM Barito Kuala menjelaskan bahwa aset tersebut belum termuat dalam LK PDAM Barito Kuala Tahun Buku 2024. Sampai saat ini PDAM Barito Kuala masih belum mencatat karena Perda Perubahan dari Perusahaan Daerah ke Persero masih dalam proses. Sehingga atas penyertaan modal sebesar Rp7.280.000,00 masih dicatat pada aset lain-lain per 31 Desember 2024.

5.3.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(68.376.105.035,15)	(75.093.826.388,87)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp68.376.105.035,15 dan Rp75.093.826.388,87. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Rp6.717.721.353,72 atau 13,43% dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023. Rincian Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 65**.

5.3.5.9 Dana Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<i>Treasury Deposit</i>	(Rp)	(Rp)
<i>Facility</i>	32.998.100.000,00	238.910.635.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.998.100.000,00 dan Rp238.910.635.000,00. Saldo Dana Transfer TDF per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp205.912.535.000,00 atau 86,19% dari saldo Dana Transfer TDF per 31 Desember 2023. Nilai TDF sebesar Rp32.998.100.000,00 berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dan KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

Pencatatan nilai TDF pada akun Aset Lainnya berdasarkan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-202/PB.6/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas TDF.

5.3.6 Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	44.885.173.753,13	35.295.124.143,23

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp44.885.173.753,13 dan Rp35.295.124.143,23. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.590.049.609,90 atau 27,17% dari saldo Kewajiban per 31 Desember 2023. Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	44.885.173.753,13	35.295.124.143,23
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban	44.885.173.753,13	35.295.124.143,23

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	44.885.173.753,13	35.295.124.143,23

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp44.885.173.753,13 dan Rp35.295.124.143,23. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.590.049.609,90 atau 27,17% dari saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	329.857.713,13	294.744.222,23
3	Utang Belanja	13.735.136.573,00	8.785.554.282,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	30.820.179.467,00	26.214.825.639,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	44.885.173.753,13	35.295.124.143,23

5.3.6.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 0,00 dan Rp0,00.

5.3.6.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	329.857.713,13	294.744.222,23

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp329.857.713,13 dan Rp294.744.222,23. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.113.490,90 atau 11,91% dari saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak	83.701.574,24	0,00
2	Pendapatan Retribusi	196.841.250,00	247.998.000,00
3	Lain-Lain PAD yang Sah	49.314.888,89	46.746.222,23
	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	329.857.713,13	294.744.222,23

a. Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Pajak

Pendapatan Diterima Dimuka – Pendapatan Pajak sebesar Rp83.701.574,24 dengan rincian sebagai berikut.

No	Pendapatan Diterima Dimuka – Pendapatan Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1	Sewa Reklame Kain	639.843,68	0,00	Lampiran 61
2	Sewa Reklame Videotron/Megatron/Papan	83.061.730,56	0,00	Lampiran 62
	Jumlah	83.701.574,24	0,00	

b. Pendapatan Diterima Dimuka – Pendapatan Retribusi

Pendapatan Diterima Dimuka – Pendapatan Retribusi sebesar Rp109.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Pendapatan Diterima Dimuka – Pendapatan Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Sewa Ruang untuk Operasional Bank Kalsel dan ATM Bank Kalsel di BPPRD	0,00	11.748.000,00
2	Sewa Tanah dan Bangunan Gedung Serbaguna di Setda	101.250.000,00	236.250.000,00
3	Sewa Tanah dan Bangunan (Ruangan Cafeteria Sekretariat DPRD/Cafe Kotego Marabahan) di Setda	8.100.000,00	0,00
4	Sewa Tanah dan Bangunan Gedung Bank BNI di Setda	87.491.250,00	0,00
	Jumlah	196.841.250,00	247.998.000,00

Uraian atas Pendapatan Diterima Dimuka – Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut.

1) Sewa Ruang untuk Operasional Bank Kalsel dan ATM Bank Kalsel di BPPRD

Merupakan sewa ruang untuk operasional Bank Kalsel dan ATM Bank Kalsel di BPPRD sesuai dengan Perjanjian Nomor 028/009.a-1/BPPRD/2022 dan 10/PKS/OPR/MRB/2022 tanggal 3 Januari 2022. Perjanjian sewa dihitung mulai Januari 2022 s.d. Desember 2024 (3 tahun). Biaya sewa telah dibayar ke Kas Daerah pada tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp35.244.000,00. Sehingga tidak terdapat Pendapatan diterima dimuka pada Tahun 2024 karena sudah diakui menjadi Pendapatan Retribusi tahun 2024.

2) Sewa Tanah dan Bangunan Gedung Serbaguna di Setda

Merupakan sewa tanah dan bangunan gedung Serbaguna di Setda sesuai dengan Perjanjian Nomor 19/PPK-KONTRAK/6304/2023 tanggal 06 Oktober 2023. Perjanjian sewa dihitung mulai 06 Oktober 2023 s.d. 05 Oktober 2025 (2 tahun) dengan nilai kontrak Rp300.000.000,00 dan potongan Pph 23 sebesar Rp30.000.000,00. Sehingga biaya sewa dibayar ke Kas Daerah pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp270.000.000. Sehingga masih terdapat Pendapatan diterima dimuka selama 9 bulan sebesar Rp101.250.000,00 yang merupakan Pendapatan Retribusi tahun 2025.

3) Sewa Tanah dan Bangunan (Ruangan Cafeteria Sekretariat Daerah/Cafe Kotego Marabahan) di Setda

Merupakan sewa tanah dan Bangunan (Ruangan Cafeteria Sekretariat Daerah/Cafe Kotego Marabahan) di Setda sesuai dengan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Nomor 000.24/1092/BPKAD/2024 dan Nomor 001/KTG/XI/2024 tanggal 21 Nopember 2024. Perjanjian sewa dihitung mulai 01 Maret 2024 s.d. 28 Februari 2025 (1 tahun) dengan nilai kontrak Rp48.600.000,00. Biaya sewa dibayar ke Kas Daerah pada tanggal 21 September 2024 sebesar Rp48.600.000,00. Sehingga masih terdapat Pendapatan Diterima Dimuka selama 2 bulan sebesar Rp8.100.000,00 yang merupakan Pendapatan Retribusi tahun 2025.

4) Sewa gedung oleh BNI



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Merupakan sewa pemanfaatan tanah seluas 363m² dan bangunan di atasnya seluas 87m² Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Marabahan sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4/803/BPKAD/2024 dan Nomor BMS/1/726/R tanggal 05 September 2024. Perjanjian sewa terhitung mulai 04 Oktober 2024 s.d. 03 Oktober 2027 (3 tahun). Biaya sewa telah dibayar ke Kas Daerah pada tanggal 08 Oktober 2024 sebesar Rp95.445.000,00. Sehingga masih terdapat Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung oleh BNI selama 33 bulan sebesar Rp87.491.250,00.

c. Pendapatan Diterima Dimuka – Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan Diterima Dimuka – Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp136.806.138,89 dengan rincian sebagai berikut.

No	Pendapatan Diterima Dimuka – Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Sewa Ruang BPKAD oleh Bank Kalsel	16.104.888,89	4.026.222,23
2	Sewa Ruang untuk ATM di RSUD H. Abdul Aziz oleh Bank Kalsel	3.960.000,00	27.720.000,00
3	Sewa Tanah untuk ATM Bank Kalsel di Kec. Tamban	29.250.000,00	0,00
4	Sewa Tanah dan Bangunan Gedung Bank BNI di Setda	0,00	15.000.000,00
	Jumlah	49.314.888,89	46.746.222,23

Uraian atas Pendapatan Diterima Dimuka – Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

1) Sewa Ruang di BPKAD oleh Bank Kalsel

Merupakan sewa pemanfaatan Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala berupa Ruang Kantor BPKAD dengan luas 15m² dan ruangan Genset BPKAD dengan luas sebesar 1,5m², yang beralamat Jalan Jendral Sudirman Marabahan, Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Nomor 028/809/BPKAD/2024 dan Nomor 12/PKS/OPR-MRB/kc/2024 tanggal 20 Agustus 2024. Perjanjian tersebut terhitung mulai 06 September 2024 s.d. 05 September 2027 (3 tahun). Biaya sewa telah dibayar ke Kas Daerah pada tanggal 04 September 2024 sebesar Rp18.118.000,00. Sehingga masih terdapat Pendapatan diterima dimuka atas sewa di BPKAD oleh Bank Kalsel selama 32 bulan sebesar Rp16.104.888,89.

2) Sewa Ruang untuk ATM di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan oleh Bank Kalsel

Merupakan sewa ruangan untuk ATM Bank Kalsel di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sesuai dengan Perjanjian Nomor 716/900-KEU/RSUD/2022 dan 13/PKS/OPR-MRB/2022 tanggal 17 Februari 2022. Perjanjian sewa terhitung



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

mulai 18 Februari 2023 s.d. 18 Februari 2024 (1 tahun). Biaya sewa telah dibayar ke Kas BLUD pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp23.760.000,00. Sewa Ruang untuk ATM di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan oleh Bank Kalsel memperpanjang jangka Waktu sewa sesuai dengan Perjanjian Nomor 445/319/RSUD/I/2023 DAN 001/PKS/OPR-MRB/2023 tanggal 17 Februari 2024. Perjanjian terhitung mulai 18 Februari 2023 s.d. 18 Februari 2025 (2 tahun). Biaya sewa telah dibayar ke Kas BLUD pada tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp47.520.000,00. Sehingga masih terdapat Pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM Bank Kalsel di RSUD Marabahan selama 2 bulan sebesar Rp3.960.000,00

3) Sewa Tanah untuk ATM Bank Kalsel di Kec. Tamban

Merupakan sewa ruangan untuk ATM Bank Kalsel di Kecamatan Tamban sesuai dengan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4/217/BPKAD/2024 dan 5/PKS/OPR/MRB/2024 tanggal 21 Maret 2024. Perjanjian sewa terhitung mulai 26 Maret 2024 s.d. 26 Maret 2028 (4 tahun). Biaya sewa telah dibayar ke Kas Daerah pada tanggal 03 April 2024 sebesar Rp36.000.000,00. Sehingga masih terdapat Pendapatan diterima dimuka atas sewa ruangan untuk ATM Bank Kalsel di Kecamatan Tamban selama 39 bulan sebesar Rp29.250.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.6.1.3 Utang Beban	13.735.136.573,00	8.785.554.282,00

Utang Beban per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp13.735.136.573,00 dan Rp8.785.554.282,00. Saldo Utang Beban per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.949.582.291,00 atau 56,34% dari saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023. Utang Beban terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut.

No	Utang Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1	Utang Belanja Pegawai - BLUD			
	Utang TPP pada Dinas Kesehatan dan RSUD	678.165.235,00	0,00	---
2	Utang Belanja Barang dan Jasa			
	a. Utang Jasa Listrik. Telepon. Air	375.185.384,00	398.385.163,00	Lampiran 54
	b. Utang Perjalanan Dinas Pegawai BOK Puskesmas	160.750,00	0,00	---
	c. Utang Jasa Dinas Kesehatan	0,00	307.093.595,00	---
3	Utang Belanja Barang dan Jasa - BLUD			
	a. Utang Jasa Pelayanan RSUD	8.328.854.842,00	5.089.252.128,00	Lampiran 55
	b. Utang Obat-obatan RSUD	4.215.185.362,00	2.990.823.396,00	---
	c. Utang Pemeliharaan Alat Kesehatan	3.885.000,00	0,00	---



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Utang Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
	RSUD (PT Graha Medika)			
	d. Utang Barang Cetak Rekam Medis RSUD	133.700.000,00	0,00	---
	Jumlah	13.735.136.573,00	8.785.554.282,00	

5.3.6.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>30.820.179.467,00</u>	<u>26.214.825.639,00</u>

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.820.179.467,00 dan Rp26.214.825.639,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.605.353.828,00 atau 17,57% dari saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023.

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2024 terdiri dari Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp30.820.179.467,00. Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis DBH	PMK Nomor 89 Tahun 2024		Jumlah
		Lebih Bayar Tahun 2022	Lebih Bayar Tahun 2023	
1	PBB	919.843.958,00	0,00	919.843.958,00
2	Cukai Hasil Tembakau	5.227,00	28.000,00	33.227,00
3	SDA Migas	0,00	177.985.000,00	177.985.000,00
4	SDA Minerba	24.147.785.579,00	0,00	24.147.785.579,00
5	SDA Kehutanan	19.481.158,00	0,00	19.481.158,00
6	SDA Perikanan	468.733.545,00	723.021.000,00	1.191.754.545,00
7	Perkebunan Sawit	0,00	4.363.296.000,00	4.363.296.000,00
	Jumlah	25.555.849.467,00	5.264.330.000,00	30.820.179.467,00

5.3.6.2 Kewajiban Panjang	Jangka	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

5.3.7 Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>3.295.826.179.953,23</u>	<u>2.866.055.993.615,97</u>

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.295.826.179.953,23 dan Rp2.866.055.993.615,97. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp429.770.186.337,26 atau 15,00% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2023.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercermin dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Pendapatan – LO	2.016.038.035.161,26	1.639.743.375.277,70

Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.016.038.035.161,26 dan Rp1.639.743.375.277,70. Pendapatan – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp376.294.659.883,57 atau 22,95% dari Pendapatan – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Pendapatan – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	113.609.784.630,26	99.500.672.755,72
2	Pendapatan Transfer	1.881.848.989.582,00	1.489.892.674.087,68
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	20.579.260.949,00	50.350.028.434,30
	Jumlah Pendapatan – LO	2.016.038.035.161,26	1.639.743.375.277,70

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	113.609.784.630,26	99.500.672.755,72

Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp113.609.784.630,26 dan Rp99.500.672.755,72. Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.109.111.874,55 atau 14,18% dari Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	PAD – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	31.274.589.548,76	30.372.353.997,00
2	Retribusi Daerah	25.597.229.277,32	3.476.788.011,33
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.301.497.184,00	11.892.720.398,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	45.436.468.620,18	53.758.810.349,39
	Jumlah PAD – LO	113.609.784.630,26	99.500.672.755,72



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak
Daerah – LO**

Tahun 2024

Tahun 2023

(Rp)

(Rp)

31.274.589.548,76

30.372.353.997,00

Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp31.274.589.548,76 dan Rp30.372.353.997,00. Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp902.235.551,76 atau 2,97% dari Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Pajak Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	61.708.769,00	66.119.705,00
2	Pajak Restoran/ Rumah Makan/ Katering	2.941.634.702,00	2.378.877.305,00
3	Pajak Hiburan	30.265.954,00	27.557.053,00
4	Pajak Reklame	94.803.175,76	153.976.725,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.195.365.917,00	15.435.575.493,00
6	Pajak Parkir	83.426.100,00	46.526.600,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	53.156.250,00	47.915.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.252.307.877,00	4.631.482.102,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.561.920.804,00	7.584.324.014,00
	Jumlah Pajak Daerah – LO	31.274.589.548,76	30.372.353.997,00

Rincian selisih antara Pendapatan Pajak – LO dengan Pendapatan Pajak – LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Pajak Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Pajak Hotel	61.708.769,00	61.708.769,00	0,00
2	Pajak Restoran/ Rumah Makan/ Katering	2.941.634.702,00	2.941.634.702,00	0,00
3	Pajak Hiburan	30.265.954,00	30.265.954,00	0,00
4	Pajak Reklame	94.803.175,76	178.504.750,00	(83.701.574,24)
5	Pajak Penerangan Jalan	17.195.365.917,00	17.107.544.278,00	87.821.639,00
6	Pajak Parkir	83.426.100,00	83.426.100,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	53.156.250,00	53.156.250,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.252.307.877,00	3.804.165.657,00	448.142.220,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.561.920.804,00	6.561.920.804,00	0,00
	Jumlah Pajak Daerah – LO	31.274.589.548,76	30.822.327.264,00	452.262.284,76



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Penjelasan selisih lebih Pendapatan Pajak – LO dengan Pendapatan Pajak – LRA tahun 2024 sebesar Rp452.262.284,76 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Pendapatan Pajak – LRA			30.822.327.264,00
1.	Pajak Reklame Pengurangan atas Pendapatan diterima dimuka pajak reklame	0,00	(83.701.574,24)	(83.701.574,24)
2.	Pajak Penerangan Jalan a. Penambahan dari Piutang tahun 2024 b. Pengurangan atas penerimaan Piutang tahun 2023	1.496.662.292,00	(1.408.840.653,00)	87.821.639,00
3.	PBB-P2 a. Penambahan dari Piutang tahun 2024 b. Pengurangan atas Piutang tahun 2023	10.523.645.117,00	(10.075.502.897,00)	448.142.220,00
	Pendapatan Pajak – LO	12.020.307.409,00	(11.568.045.124,24)	31.274.589.548,76

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>25.597.229.277,32</u>	<u>3.476.788.011,33</u>

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp25.597.229.277,32 dan Rp3.476.788.011,33. Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.120.441.265,99 atau 636,23% dari Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum		
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.700.291.194,32	655.145.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	105.135.000,00	85.832.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.040.000,00	10.980.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	211.580.000,00	206.039.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	120.270.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	36.782.000,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	13.880.000,00	402.520.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	900.429.006,00	754.067.526,33
	Retribusi Terminal	7.200.000,00	7.810.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.100.000,00	1.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	149.875.000,00	182.197.000,00
	Retribusi Penyeberangan di Air	200.728.000,00	252.059.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	355.604.000,00	289.974.750,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3	Retribusi Perizinan Tertentu		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	471.911.735,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	200.000,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	833.122.877,00	0,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	96.244.200,00	0,00
	Jumlah Retribusi Daerah – LO	25.597.229.277,32	3.476.788.011,33

Rincian selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Retribusi Jasa Umum			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.700.291.194,32	22.700.291.194,32	0,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	105.135.000,00	105.135.000,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.040.000,00	22.040.000,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	211.580.000,00	211.580.000,00	0,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	13.880.000,00	0,00	13.880.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	900.429.006,00	963.759.650,00	(63.330.644,00)
	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	Retribusi Penyeberangan di Air	149.875.000,00	148.660.000,00	1.215.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.728.000,00	200.428.000,00	300.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	0,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	0,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	833.122.877,00	833.122.877,00	0,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	96.244.200,00	96.244.200,00	0,00
	Jumlah Retribusi Daerah – LO	25.597.229.277,32	25.645.164.921,32	(47.935.644,00)

Penjelasan selisih kurang Pendapatan Retribusi – LO dengan Pendapatan Retribusi – LRA tahun 2024 sebesar (Rp47.935.644,00) adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA			25.645.164.921,32
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi a. Penambahan dari Piutang tahun 2020 dan 2021 a.n. PT Indosat	13.880.000,00	0,00	13.880.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah a. Penambahan dari Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan b. Penambahan dari Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum c. Penambahan dari Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor d. Pengurangan dari Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan (Cafe Kotego Marabahan) e. Pengurangan dari Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa gedung oleh BNI (Setda) f. Pengurangan karena penerimaan piutang retribusi Tahun 2023 g. Penambahan dari Pendapatan diterima dimuka yang sudah diakui sebagai Pendapatan Tahun 2024 atas Sewa Tanah dan Bangunan Gedung Serbaguna h. Penambahan dari pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 atas sewa ruang dan ATM Bank Kalsel i. Penambahan dari piutang retribusi Pemakaian Ruangan pada Diskoperindag	26.517.000,00 560.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 11.748.000,00 338.850,00	0,00 0,00 0,00 (8.100.000,00) (87.491.250,00) (159.903.244,00) 0,00 0,00 0,00	26.517.000,00 560.000,00 18.000.000,00 (8.100.000,00) (87.491.250,00) (159.903.244,00) 135.000.000,00 11.748.000,00 338.850,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan a. Penambahan dari Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
4	Retribusi Penyeberangan Di Air a. Penambahan dari Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	300.000,00	0,00	300.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	207.558.850,00	(255.494.494,00)	25.597.229.277,32

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan

**Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan – LO**

Tahun 2024

(Rp)

11.301.497.184,00

Tahun 2023

(Rp)

11.892.720.398,00

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.301.497.184,00 dan Rp11.892.720.398,00. Hasil Kekayaan Daerah yang



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Dipisahkan – LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp591.223.214,00 atau 4,97% dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2023.

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan pos untuk menampung pendapatan akrual yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut.

No	BUMD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	PT Bank Kalsel	11.010.547.184,00	11.766.497.002,00
2	PT BPR Tapin Sejahtera	0,00	0,00
3	PD Aneka Usaha Selidah	0,00	17.723.396,00
4	PDAM Kabupaten Barito Kuala	0,00	0,00
5	PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	290.950.000,00	108.500.000,00
	Jumlah	11.301.497.184,00	11.892.720.398,00

Rincian selisih antara Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	BUMD	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	PT Bank Kalsel	11.010.547.184,00	11.010.547.184,00	0,00
2	PT BPR Tapin Sejahtera	0,00	0,00	0,00
3	PD Aneka Usaha Selidah	0,00	0,00	0,00
4	PDAM Kabupaten Barito Kuala	0,00	0,00	0,00
5	PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	290.950.000,00	505.750.000,00	(214.800.000,00)
	Jumlah	11.301.497.184,00	11.516.297.184,00	(214.800.000,00)

Penjelasan selisih kurang Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA tahun 2024 sebesar (Rp214.800.000,00) adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA			11.516.297.184,00
1	Alokasi dividen tahun 2022 dari PD PBKM yang disetorkan di tahun 2024	0,00	(214.800.000,00)	(214.800.000,00)
	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	(214.800.000,00)	11.301.497.184,00

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<u><u>45.436.468.620,18</u></u>	<u><u>53.758.810.349,39</u></u>

Lain-Lain PAD yang Sah – LO tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp45.436.468.620,18 dan Rp53.758.810.349,39. Lain-Lain PAD yang Sah – LO tahun



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.322.341.729,21 atau 15,48% dari Lain-Lain PAD yang Sah – LO tahun 2023.

Lain-Lain PAD yang Sah – LO merupakan kelompok penerimaan asli daerah yang sah akrual yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pos pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rincian sebagai berikut.

No	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	632.982.900,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	27.789.333,34	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro – LO	5.401.862.197,48	10.275.300.523,33
4	Pendapatan Bunga – LO	14.360.748.029,36	671.779.380,00
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	2.567.434.300,99	4.733.443.489,13
6	Pendapatan Denda Pajak – LO	155.218.040,00	188.726.394,00
7	Pendapatan dari Pengembalian – LO	129.696.505,15	149.380.428,00
8	Pendapatan BLUD – LO	22.793.720.213,86	37.107.197.234,93
	Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah – LO	45.436.468.620,18	53.758.810.349,39

Rincian selisih antara Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO dengan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	813.879.380,00	(813.879.380,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	27.789.333,34	54.118.000,00	(26.328.666,66)
3	Penerimaan Jasa Giro – LO	5.401.862.197,48	5.401.862.197,48	0,00
4	Pendapatan Bunga – LO	14.360.748.029,36	14.360.748.029,36	0,00
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	2.567.434.300,99	2.567.434.300,99	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak – LO	155.218.040,00	155.218.040,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian – LO	129.696.505,15	129.696.505,15	0,00
8	Pendapatan BLUD – LO	22.793.720.213,86	21.238.777.188,86	1.554.943.025,00
	Jumlah	45.436.468.620,18	44.721.733.641,84	714.734.978,34

Penjelasan selisih lebih Lain-Lain PAD yang Sah – LO dengan Lain-Lain PAD yang Sah – LRA tahun 2024 sebesar Rp714.734.978,34 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Lain-Lain PAD yang Sah – LRA			44.721.733.641,84
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO			
	a. Pengurangan atas Hasil Penjualan Alat Angkutan yang direklas ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	(624.475.600,00)	(624.475.600,00)
	b. Pengurangan atas Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya yang direklas ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	(189.403.780,00)	(189.403.780,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO			
	a. Penerimaan pendapatan diterima dimuka yang sudah diakui sebagai pendapatan atas Sewa Tanah dan Bangunan Gedung Bank BNI (bulan Januari s.d September 2024 pada BPKAD)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	b. Penerimaan pendapatan diterima dimuka tahun 2023 atas Sewa Ruang BPKAD oleh Bank Kalsel	4.026.222,23	0,00	4.026.222,23
	c. Penambahan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 atas Sewa Tanah dan Bangunan Gedung Bank BNI	0,00	(16.104.888,89)	(16.104.888,89)
	d. Penambahan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 atas Sewa Tanah untuk ATM Bank Kalsel di Kec. Tamban	0,00	(29.250.000,00)	(29.250.000,00)
3	Pendapatan BLUD – LO	3.745.654.900,00	(2.190.711.875,00)	1.554.943.025,00
	a. Penambahan dari Piutang tahun 2024 pada RSUD	3.721.894.900,00	0,00	3.721.894.900,00
	b. Penerimaan atas Piutang tahun 2023 pada RSUD	0,00	(2.045.399.465,00)	(2.045.399.465,00)
	c. Penerimaan atas Piutang tahun 2023 pada Puskesmas	0,00	(145.312.410,00)	(145.312.410,00)
	d. Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa ruang untuk ATM Bank Kalsel di RSUD	23.760.000,00	0,00	23.760.000,00
	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	3.764.681.122,23	(2.236.066.763,89)	46.250.348.000,18

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<u>1.881.848.989.582,00</u>	<u>1.489.892.674.087,68</u>

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.881.848.989.582,00 dan Rp1.489.892.674.087,68. Pendapatan Transfer – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Rp391.956.315.494,32 atau 26,31% dari Pendapatan Transfer – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan Transfer – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.723.827.308.285,00	1.350.452.778.024,00
2	Transfer Pusat Lainnya	19.410.278.000,00	5.792.351.000,00
3	Transfer Antar Daerah	138.611.403.297,00	133.647.545.063,68
	Jumlah Pendapatan Transfer – LO	1.881.848.989.582,00	1.489.892.674.087,68

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.723.827.308.285,00	1.350.452.778.024,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.723.827.308.285,00 dan Rp1.350.452.778.024,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp373.374.530.261,00 atau 27,65% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	865.336.481.053,00	533.739.027.899,00
2	Dana Alokasi Umum	594.917.264.693,00	552.680.091.910,00
3	Dana Alokasi Khusus	263.573.562.539,00	264.033.658.215,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	1.723.827.308.285,00	1.350.452.778.024,00

Rincian selisih antara Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	865.336.481.053,00	624.476.340.000,00	240.860.141.053,00
2	Dana Alokasi Umum	594.917.264.693,00	594.917.264.693,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus	263.573.562.539,00	263.573.562.539,00	0,00
	Jumlah	1.723.827.308.285,00	1.482.967.167.232,00	240.860.141.053,00

Penjelasan selisih lebih Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dengan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA tahun 2024 sebesar Rp240.860.141.053,00 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA			1.482.967.167.232,00
1	DBH Pajak Penghasilan Penambahan dari kurang bayar DBH tahun 2022 dan 2023	2.545.113.760,00	0,00	2.545.113.760,00
2	DBH PBB a. Penambahan dari kurang bayar DBH tahun 2023 b. Pengurangan dari lebih bayar DBH tahun 2022	23.745.386.000,00	(919.843.958,00)	22.825.542.042,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau a. Penambahan dari kurang bayar DBH tahun 2023 b. Pengurangan dari lebih bayar DBH tahun 2022 dan 2023	810,00	(33.227,00)	(32.417,00)
4	DBH SDA Migas Pengurangan karena lebih bayar DBH tahun 2023	645,00	(177.985.000,00)	(177.984.355,00)
5	DBH SDA Minerba a. Penambahan dari kurang bayar DBH tahun 2023 b. Pengurangan dari lebih bayar DBH tahun 2022	245.388.907.814,00	(24.147.785.579,00)	221.241.122.235,00
6	DBH SDA Kehutanan – PSDH a. Penambahan dari kurang bayar DBH tahun 2023 b. Pengurangan dari lebih bayar DBH tahun 2022	911.491,00	(19.481.158,00)	(18.569.667,00)
7	DBH SDA Perikanan Pengurangan karena lebih bayar DBH tahun 2022 dan 2023	0,00	(1.191.754.545,00)	(1.191.754.545,00)
8	DBH Sawit Pengurangan karena lebih bayar DBH tahun 2023	0,00	(4.363.296.000,00)	(4.363.296.000,00)
	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	271.680.320.520,00	(30.820.179.467,00)	1.723.827.308.285,00

**5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
Lainnya – LO**

**Tahun 2024
(Rp)**

19.410.278.000,00

**Tahun 2023
(Rp)**

5.792.351.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp19.410.278.000,00 dan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Rp5.792.351.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.617.927.000,00 atau 235,10% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	5.792.351.000,00
2	Dana Desa	0,00	0,00
3	Insentif Fiskal	19.410.278.000,00	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	19.410.278.000,00	5.792.351.000,00

Rincian selisih antara Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Dana Desa	0,00	156.599.648.000,00	(156.599.648.000,00)
3	Insentif Fiskal	19.410.278.000,00	19.410.278.000,00	0,00
	Jumlah	19.410.278.000,00	176.009.926.000,00	(156.599.648.000,00)

Penjelasan selisih kurang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA tahun 2024 sebesar (Rp156.599.648.000,00) adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA			176.009.926.000,00
1	Dana Desa Dana Desa yang Bersumber Pada APBN sesuai dengan Bultek SAP No. 21 yang merupakan hak entitas, sehingga seharusnya tidak dicatat pada LO	0,00	(156.599.648.000,00)	(156.599.648.000,00)
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	0,00	(156.599.648.000,00)	19.410.278.000,00

**5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer
Antar Daerah – LO**

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<u>138.611.403.297,00</u>	<u>133.647.545.063,68</u>

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp138.611.403.297,00 dan Rp133.647.545.063,68. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.963.858.233,32 atau 3,71% dari Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Transfer Antar Daerah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10.162.070.050,00	30.109.167.036,32
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.453.135.540,00	14.044.191.107,64
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.782.245.947,00	72.211.018.597,05
4	Pajak Air Permukaan	233.572.413,00	353.799.993,67
5	Pajak Rokok	14.980.379.347,00	16.929.368.329,00
	Jumlah Transfer Antar Daerah – LO	138.611.403.297,00	133.647.545.063,68

Rincian selisih antara Transfer Pemerintah Provinsi – LO dengan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Transfer Antar Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10.162.070.050,00	9.635.486.814,00	526.583.236,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.453.135.540,00	11.466.525.375,00	986.610.165,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.782.245.947,00	103.870.813.718,00	(3.088.567.771,00)
4	Pajak Air Permukaan	233.572.413,00	282.263.214,00	(48.690.801,00)
5	Pajak Rokok	14.980.379.347,00	17.733.460.867,00	(2.753.081.520,00)
	Jumlah	138.611.403.297,00	142.988.549.988,00	(4.377.146.691,00)

Penjelasan selisih kurang Transfer Pemerintah Provinsi – LO dengan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA tahun 2024 sebesar (Rp4.377.146.691,00) adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Transfer Antar Daerah – LRA			142.988.549.988,00
1	Pajak Kendaraan Bermotor a. Penambahan dari Piutang tahun 2024 b. Pengurangan karena penerimaan Piutang tahun 2023	2.968.479.450,00	(2.441.896.213,00)	526.583.236,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a. Penambahan dari Piutang tahun 2024 b. Pengurangan karena penerimaan Piutang tahun 2023	3.809.324.227,00	(2.822.714.063,00)	986.610.165,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor a. Penambahan dari Piutang tahun 2024 b. Pengurangan karena penerimaan Piutang tahun 2023	26.016.495.901,00	(29.105.063.672,00)	(3.088.567.771,00)
4	Pajak Air Permukaan a. Penambahan dari Piutang tahun 2024 b. Pengurangan karena penerimaan Piutang tahun 2023	40.490.313,00	(89.181.114,00)	(48.690.801,00)
5	Pajak Rokok a. Penambahan dari Piutang tahun 2024 b. Pengurangan karena penerimaan Piutang tahun 2023	2.821.656.716,00	(5.574.738.236,00)	(2.753.081.520,00)
	Transfer Antar Daerah – LO	35.656.446.607,00	(40.033.593.298,00)	138.611.403.297,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

**5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah – LO**

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	20.579.260.949,00	50.350.028.434,30

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.579.260.949,00 dan Rp50.350.028.434,30. Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp29.770.767.485,30 atau 59,13% dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO tahun 2023. Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah – LO	20.579.260.949,00	50.350.028.434,30
2	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	20.579.260.949,00	50.350.028.434,30

**5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah –
LO**

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	20.579.260.949,00	50.350.028.434,30

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.579.260.949,00 dan Rp50.350.028.434,30. Pendapatan Hibah – LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp29.770.767.485,30 atau 59,13% dari Pendapatan Hibah – LO tahun 2023. Rincian Pendapatan Hibah – LO tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Pendapatan Hibah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	543.171.779,00	1.457.480.339,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.036.089.170,00	48.862.548.095,30
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi/Masyarakat	0,00	30.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah – LO	20.579.260.949,00	50.350.028.434,30

Rincian selisih antara Pendapatan Hibah – LO dengan Pendapatan Hibah – LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Pendapatan Hibah – LO	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	543.171.779,00	0,00	543.171.779,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.036.089.170,00	0,00	20.036.089.170,00
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	20.579.260.949,00	0,00	20.579.260.949,00

Penjelasan selisih lebih Pendapatan Hibah – LO dengan Pendapatan Hibah – LRA tahun 2024 sebesar Rp20.579.260.949,00 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Pendapatan Hibah – LRA			0,00
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat			
	a. Hibah dari BKKBN Provinsi Kalsel kepada Dinas P2AKBP3A berupa alat kontrasepsi	278.252.464,00	0,00	278.252.464,00
	b. Hibah dari Perpusnas kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa peralatan dan mesin	264.919.315,00	0,00	264.919.315,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
	a. Hibah Tanah Fasum & Fasos dari developer perumahan sebanyak 82 persil	1.598.9142.600,00	0,00	1.598.9142.600,00
	b. Hibah Jalan khusus kompleks dari developer	4.046.946.570,00	0,00	4.046.946.570,00
	Pendapatan Hibah – LO	20.579.260.949,00	0,00	20.579.260.949,00

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Lainnya – LO tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.4.2 Beban	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.612.242.252.523,19	1.323.922.145.596,16

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.612.242.252.523,19 dan Rp1.323.922.145.596,16. Beban tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp288.320.106.927,03 atau 21,78% dari Beban tahun 2023. Rincian Beban tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai	722.609.433.669,80	597.465.705.627,00
2	Beban Barang dan Jasa	446.149.691.634,13	359.021.089.930,90
3	Beban Hibah	78.814.013.866,00	57.910.459.862,20
4	Beban Bantuan Sosial	1.316.433.343,00	4.313.079.794,00
5	Beban Penyusutan	237.716.649.123,90	202.073.780.159,25
6	Beban Amortisasi	1.031.035.869,11	658.127.165,80
7	Beban Penyisihan Piutang	818.597.567,25	1.619.767.015,25
8	Beban Lain-lain	0,00	17.837.193.775,76
9	Beban Transfer	123.786.397.450,00	83.022.942.266,00
	Jumlah Beban	1.612.242.252.523,19	1.323.922.145.596,16



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.1 Beban Pegawai

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	722.609.433.669,80	597.465.705.627,00

Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp722.609.433.669,80 dan Rp597.465.705.627,00. Beban Pegawai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp125.143.728.042,80 atau 20,95% dari Beban Pegawai tahun 2023. Rincian Beban Pegawai tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Beban Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	403.198.366.110,00	343.985.543.669,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	180.766.750.546,00	128.390.175.456,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	103.320.424.720,00	93.806.776.940,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.324.255.844,00	18.011.087.616,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.141.827.869,00	152.123.780,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	555.101.936,00	506.236.000,00
7	Beban Pegawai BOSP	2.923.398.780,80	3.921.110.882,00
8	Beban Pegawai BLUD	11.379.307.864,00	8.692.651.284,00
	Jumlah Beban Pegawai	722.609.433.669,80	597.465.705.627,00

Rincian selisih antara Beban Pegawai di LO dengan Belanja Pegawai di LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Beban Pegawai	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	403.198.366.110,00	402.520.200.875,00	678.165.235,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	180.766.750.546,00	180.766.750.546,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	103.320.424.720,00	103.320.424.720,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.324.255.844,00	19.324.255.844,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.141.827.869,00	1.141.827.869,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	555.101.936,00	555.101.936,00	0,00
7	Beban Pegawai BOSP	2.923.398.780,80	2.923.398.780,80	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	11.379.307.864,00	11.379.307.864,00	0,00
	Jumlah	722.609.433.669,80	721.931.268.434,80	678.165.235,00

Penjelasan selisih lebih Beban Pegawai di LO dengan Belanja Pegawai di LRA tahun 2024 sebesar Rp678.165.235,00 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Belanja Pegawai di LRA			721.931.268.434,80
1	Utang Beban TPP PNS Dinas Kesehatan bulan Desember 2024	318.963.325,00	0,00	318.963.325,00
2	Utang Beban TPP PNS RSUD bulan	359.201.910,00	0,00	359.201.910,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Desember 2024			
	Beban Pegawai di LO	678.165.235,00	0,00	722.609.433.669,80

5.4.2.2	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		446.149.691.634,13	359.021.089.930,90

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp446.149.691.634,13 dan Rp359.021.089.930,90. Beban Barang dan Jasa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp87.128.601.703,23 atau 24,27% dari Beban Barang dan Jasa tahun 2023. Rincian Beban Barang dan Jasa tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Barang	66.154.996.059,45	69.821.452.289,07
2	Beban Jasa	149.669.861.856,69	120.537.413.757,50
3	Beban Pemeliharaan	56.726.226.523,81	35.241.617.572,00
4	Beban Perjalanan Dinas	100.463.149.916,00	73.778.178.794,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.937.755.980,00	4.764.674.170,00
6	Beban Barang dan Jasa BOSP	31.238.754.197,28	29.149.399.139,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	31.958.947.100,90	25.728.354.209,33
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	446.149.691.634,13	359.021.089.930,90

Rincian selisih antara Beban Barang dan Jasa di LO dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Barang	66.154.996.059,45	67.742.520.154,00	(1.587.524.094,55)
2	Beban Jasa	149.669.861.856,69	150.418.165.296,69	(748.303.440,00)
3	Beban Pemeliharaan	56.726.226.523,81	61.042.113.902,30	(4.315.887.378,49)
4	Beban Perjalanan Dinas	100.463.149.916,00	100.462.989.166,00	160.750,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.937.755.980,00	9.937.755.980,00	0,00
6	Beban Barang dan Jasa BOSP	31.238.754.197,28	31.238.754.197,28	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	31.958.947.100,90	27.562.181.054,00	4.396.766.046,90
	Jumlah	446.149.691.634,13	448.404.479.750,27	(2.254.788.116,14)

Penjelasan selisih kurang Beban Barang dan Jasa di LO dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA tahun 2024 sebesar (Rp2.254.788.116,14) adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa di LRA			448.404.479.750,27
1	Beban Barang	205.074.315,00	(1.792.598.409,55)	(1.587.524.094,55)
	a. Belanja Bahan Bahan Bangunan dan Konstruksi Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	(55.600.000,00)	(55.600.000,00)
	b. Belanja Bahan Bahan Bangunan dan Konstruksi Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	(48.268.900,00)	(48.268.900,00)
	c. Koreksi LO atas beban Persediaan (beban Persediaan 2023 dan Beban Persediaan 2024)	0,00	(469.150.744,55)	(469.150.744,55)
	d. Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas yang direklasifikasi menjadi Persediaan	294.400,00	0,00	294.400,00
	e. Belanja Alat Listrik Yang Direklasifikasi Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	(14.950.000,00)	(14.950.000,00)
	f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Pendukung Olahraga Yang direklasifikasi Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	(11.890.000,00)	(11.890.000,00)
	g. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Yang Direklasifikasi Menjadi Aset tetap Peralatan dan Mesin	0,00	(117.542.000,00)	(117.542.000,00)
	h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Ekstrakomtabel)	156.610.600,00	0,00	156.610.600,00
	i. Hibah Buku dari Perpustakaan Yang Menjadi Barang Ekstrakomptabel	48.169.315,00	0,00	48.169.315,00
	j. Belanja Gedung dan Bangunan Yang Menjadi Aset tetap Gedung dan Bangunan	0,00	(1.060.796.765,00)	(1.060.796.765,00)
	k. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	(14.400.000,00)	(14.400.000,00)
2	Beban Jasa	0,00	(748.303.440,00)	(748.303.440,00)
	a. Belanja Jasa Tenaga Ahli yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	(17.800.000,00)	(17.800.000,00)
	b. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	(499.552.134,00)	(499.552.134,00)
	c. Belanja Penambahan Daya yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	(197.802.217,00)	(197.802.217,00)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	d. Koreksi LO atas beban tagihan telepon	0,00	(277.798,00)	(277.798,00)
	e. Koreksi LO atas beban tagihan Air	0,00	(2.275.000,00)	(2.275.000,00)
	f. Koreksi LO atas beban tagihan Listrik	0,00	(5.343.593,00)	(5.343.593,00)
	g. Koreksi LO Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	0,00	(5.942.028,00)	(5.942.028,00)
	h. Belanja Jasa Konsultansi direklas menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(19.310.670,00)	(19.310.670,00)
3	Beban Pemeliharaan	0,00	(4.315.887.378,49)	(4.315.887.378,49)
	a. Belanja Pemeliharaan direklas menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	(4.265.937.378,49)	(4.265.937.378,49)
	b. Belanja Pemeliharaan direklas menjadi Aset Tetap Tidak Berwujud	0,00	(49.950.000,00)	(49.950.000,00)
4	Beban Perjalanan Dinas			
	a. Utang Perjalanan Dinas Pegawai BOK Puskesmas	160.750,00	0,00	160.750,00
5	Beban Barang dan Jasa BLUD	14.935.818.076,04	(10.539.052.029,14)	4.396.766.046,90
	a. Penambahan karena belanja Modal yang direklasifikasi menjadi belanja barang dan jasa	11.585.900,00	0,00	11.585.900,00
	b. Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Aset Tetap (Ekstrakomtabel)	12.394.500,00	0,00	12.394.500,00
	c. Beban untuk Sisa Persediaan Tahun 2023 (BLUD) dan Persediaan tahun 2024 (BLUD)	2.229.722.682,04	(1.483.055.588,14)	746.667.093,90
	d. Beban Tagihan internet BLUD 2023 dan 2024	489.790,00	(9.338.650,00)	(8.848.860,00)
	e. Beban utang jangka pendek lainnya BLUD tahun 2023 dan 2024	137.585.000,00	(433.487.575,00)	(295.902.575,00)
	f. Beban hutang jasa layanan -BLUD tahun 2023 dan 2024	8.328.854.842,00	(5.622.346.820,00)	2.706.508.022,00
	g. Beban utang obat-obatan BLUD tahun 2023 dan 2024	4.215.185.362,00	(2.990.823.396,00)	1.224.361.966,00
	Beban Barang dan Jasa di LO	15.141.053.141,04	(17.395.841.257,18)	446.149.691.634,13

5.4.2.3	Beban Subsidi	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Beban Subsidi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.4	Beban Hibah	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		<u>78.814.013.866,00</u>	<u>57.910.459.862,20</u>

Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp78.814.013.866,00 dan Rp57.910.459.862,20. Beban Hibah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.903.554.003,80 atau 36,10% dari Beban Hibah tahun 2023. Rincian Beban Hibah tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.602.447.400,00	20.617.966.600,00
2	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.574.913.306,00	28.115.743.126,20
3	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.255.200.939,00	4.724.749.450,00
4	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.731.607.550,00	3.266.640.686,00
5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	0,00
6	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.265.429.432,00	1.185.360.000,00
7	Beban Hibah Dana BOSP	8.234.415.239,00	0,00
	Jumlah Beban Hibah	78.814.013.866,00	57.910.459.862,20

Rincian selisih antara Beban Hibah di LO dengan Belanja Hibah di LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.602.447.400,00	28.602.447.400,00	0,00
2	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.574.913.306,00	25.574.913.306,00	0,00
3	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.255.200.939,00	11.976.948.475,00	278.252.464,00
4	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.731.607.550,00	2.731.607.550,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Organisasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			
6	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.265.429.432,00	1.265.429.432,00	0,00
7	Beban Hibah Dana BOSP	8.234.415.239,00	8.234.415.239,00	0,00
	Jumlah	78.814.013.866,00	78.535.761.402,00	278.252.464,00

Penjelasan selisih lebih Beban Hibah di LO dengan Belanja Hibah di LRA tahun 2024 sebesar Rp278.252.464,00 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Belanja Hibah di LRA			78.535.761.402,00
1	Penerimaan hibah barang tahun 2024 pada Dinas P2AKBP3A berupa alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Kalsel	234.819.940,00	0,00	234.819.940,00
2	Hibah barang yang menjadi persediaan pada Dinas P2AKBP3A	43.432.524,00	0,00	43.432.524,00
	Beban Hibah di LO	278.252.464,00	0,00	78.814.013.866,00

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.316.433.343,00	4.313.079.794,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.316.433.343,00 dan Rp4.313.079.794,00. Beban Bantuan Sosial tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.996.646.451,00 atau 69,48% dari Beban Bantuan Sosial tahun 2023. Rincian Beban Bantuan Sosial tahun 2024 dan 2024 sebagai berikut.

No	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	199.901.870,00	1.998.470.430,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.665.500,00	11.036.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	202.307.748,00	2.046.518.409,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	896.558.225,00	257.054.955,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	1.316.433.343,00	4.313.079.794,00

Rincian selisih antara Beban Bantuan Sosial di LO dengan Belanja Bantuan Sosial di LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	199.901.870,00	199.901.870,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.665.500,00	17.665.500,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	202.307.748,00	202.307.748,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	896.558.225,00	896.558.225,00	0,00
	Jumlah	1.316.433.343,00	1.316.433.343,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial di LO dengan Belanja Bantuan Sosial di LRA tahun 2024.

5.4.2.6	Beban Penyusutan	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		<u>237.716.649.123,90</u>	<u>202.073.780.159,25</u>

Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp237.716.649.123,90 dan Rp202.073.780.159,25. Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.642.868.964,65 atau 17,64% dari Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2023. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Beban Penyusutan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	48.239.222.839,68	46.270.277.877,58
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.403.583.159,59	53.707.872.596,86
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	142.916.478.414,63	101.915.928.295,81
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	157.364.710,00	179.701.389,00
	Jumlah	237.716.649.123,90	202.073.780.159,25

Rincian Beban Penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 56**.

5.4.2.7	Beban Amortisasi	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		<u>1.031.035.869,11</u>	<u>658.127.165,80</u>

Beban Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.031.035.869,11 dan Rp658.127.165,80. Beban Amortisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp372.908.703,31 atau 56,66% dari Beban Amortisasi tahun 2023. Rincian Beban Amortisasi tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Beban Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Lisensi	78.884.582,67	42.852.440,00
2	Hak Cipta	0,00	0,00
3	Perangkat Lunak	327.435.972,02	355.869.699,80



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Beban Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4	Kajian (DED)	624.715.314,42	259.405.026,00
5	Warisan Budaya	0,00	0,00
	Jumlah	1.031.035.869,11	658.127.165,80

Rincian Beban Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 59**.

5.4.2.8	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>818.597.567,25</u>	<u>1.619.767.015,25</u>

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp818.597.567,25 dan Rp1.619.767.015,25. Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp801.169.448,01 atau 49,46% dari Beban Penyisihan Piutang tahun 2023. Rincian Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	470.595.367,25	1.366.728.915,25
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	8.664.250,00	9.301.750,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	339.337.950,00	243.736.350,00
	Jumlah	818.597.567,25	1.619.767.015,25

Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang
1	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.739.849.758,50)	(5.210.445.125,75)	470.595.367,25
2	Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi	(10.169.250,00)	(18.833.500,00)	8.664.250,00
3	Akumulasi Penyisihan Piutang Lainnya	(6.313.883.325,00)	(6.653.221.275,00)	339.337.950,00
	Jumlah	(11.096.869.333,50)	(11.915.466.900,75)	818.597.567,25

5.4.2.9	Beban Lain-Lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>0,00</u>	<u>17.837.193.775,76</u>

Beban Lain-Lain Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.837.193.775,76. Beban Lain-Lain tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp17.837.193.775,76 atau 100% dari Beban Lain-Lain tahun 2023. Beban Lain-Lain merupakan beban atas kerugian penyertaan modal ke BUMD dengan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

No	Beban Lain-Lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	PT BPR Tapin Sejahtera	0,00	3.616.741.238,52
2	PDAM Barito Kuala	0,00	13.842.625.664,24
3	PD Aneka Usaha Selidah	0,00	375.900.202,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Beban Lain-Lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4	PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	0,00	1.926.671,00
	Jumlah	0,00	17.837.193.775,76

5.4.2.10 Beban Transfer	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>123.786.397.450,00</u>	<u>83.022.942.266,00</u>

Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp123.786.397.450,00 dan Rp83.022.942.266,00. Beban Transfer tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.763.455.184,00 atau 49,10% dari Beban Transfer tahun 2023. Rincian Beban Transfer tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Beban Transfer	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	2.895.367.424,00	2.530.800.556,00
2	Bagi Hasil Retribusi	364.811.281,00	397.279.936,00
3	Bantuan Keuangan ke Pemprov Kalsel	5.501.794.339,00	0,00
4	Bantuan Keuangan ke Desa	115.024.424.406,00	80.094.861.774,00
	Jumlah	123.786.397.450,00	83.022.942.266,00

Rincian selisih antara Beban Transfer di LO dengan Belanja Transfer di LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Beban Transfer	Tahun 2024 (Rp)		Selisih LO – LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil Pajak	2.895.367.424,00	2.895.367.424,00	0,00
2	Bagi Hasil Retribusi	364.811.281,00	364.811.281,00	0,00
3	Bantuan Keuangan ke Pemprov Kalsel	5.501.794.339,00	5.501.794.339,00	0,00
4	Bantuan Keuangan ke Desa	115.024.424.406,00	271.624.072.406,00	(156.599.648.000,00)
	Jumlah	123.786.397.450,00	280.386.045.450,00	(156.599.648.000,00)

Penjelasan selisih kurang Beban Transfer di LO dengan Belanja Transfer di LRA tahun 2024 sebesar (Rp156.599.648.000,00) adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Belanja Transfer di LRA			280.386.045.450,00
1	Belanja Dana Desa yang Bersumber Pada APBN sesuai dengan Bultek SAP No. 21 yang merupakan hak entitas, sehingga seharusnya tidak dicatat pada LO	0,00	(156.599.648.000,00)	(156.599.648.000,00)
	Beban Transfer di LO	0,00	(156.599.648.000,00)	123.786.397.450,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>403.795.782.638,07</u>	<u>315.821.229.681,54</u>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp403.795.782.638,07 dan Rp315.821.229.681,54. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp87.974.552.956,53 atau 27,86% dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2023. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan – LO	2.016.038.035.161,26	1.639.743.375.277,70
2	Beban	1.612.242.252.523,19	1.323.922.145.596,16
	Jumlah (1 – 2)	403.795.782.638,07	315.821.229.681,54

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>(5.505.209.626,45)</u>	<u>0,00</u>

Surplus/Defisit dari Non Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp)5.505.209.626,45 dan Rp0,00 merupakan surplus penjualan Aset Non Lancar – LO. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.505.209.626,45 atau 100% dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	813.879.380,00	0,00
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - Penurunan Nilai Investasi	(6.319.089.006,45)	0,00
	Jumlah	(5.505.209.626,45)	0,00

5.4.5 Beban Luar Biasa	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>360.250.000,00</u>	<u>1.546.266.050,00</u>

Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp360.250.000,00 dan Rp1.546.266.050,00. Beban Luar Biasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.186.016.050,00 atau 76,70% dari Beban Luar Biasa tahun 2023. Beban Luar Biasa tahun 2024 merupakan realisasi dari Belanja Tak Terduga yang digunakan untuk bantuan Sosial kepada masyarakat/keluarga dan atau perorangan (individu) yang terkena musibah/bencana yang tidak direncanakan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.6 Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>(360.250.000,00)</u>	<u>(1.546.266.050,00)</u>

Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp360.250.000,00) dan (Rp1.546.266.050,00). Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.186.016.050,00 atau 76,70% dari Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa tahun 2023.

5.4.7 Surplus/(Defisit) – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>397.930.323.011,62</u>	<u>314.274.963.631,54</u>

Surplus/(Defisit) – LO Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp397.930.323.011,62 dan Rp314.274.963.631,54. Surplus/(Defisit) – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp83.655.359.380,08 atau 26,62% dari Surplus/(Defisit) tahun 2023. Rincian Surplus/(Defisit) tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	403.795.782.638,07	315.821.229.681,54
2	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(5.505.209.626,45)	0,00
3	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	(360.250.000,00)	(1.546.266.050,00)
	Jumlah (1 + 2 – 3)	397.930.323.011,62	314.274.963.631,54



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.5 Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dipengaruhi oleh arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	382.923.048.380,09	260.244.773.287,13

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp382.244.883.236,09 dan Rp260.244.773.287,13 sehingga terdapat kenaikan Rp122.678.275.183,96 atau 47,14% dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Aktivitas Operasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	Arus Kas Masuk		
1	Pendapatan Pajak Daerah	30.822.327.264,00	28.953.674.232,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.645.164.921,32	3.648.113.310,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.516.297.184,00	11.892.720.398,00
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	43.907.854.261,84	52.253.575.752,36
5	Dana Bagi Hasil Pajak	27.901.098.000,00	308.637.282.837,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	596.575.242.000,00	0,00
7	Dana Alokasi Umum	594.917.264.693,00	552.680.091.910,00
8	Dana Alokasi Khusus	263.573.562.539,00	264.039.924.701,47
9	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	19.410.278.000,00	5.792.351.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	142.988.549.988,00	132.614.910.529,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi	0,00	0,00
12	Pendapatan Lainnya	156.599.648.000,00	155.105.335.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk (A)	1.913.857.286.851,16	1.515.617.979.669,83
B	Arus Kas Keluar		
1	Belanja Pegawai	721.931.268.434,80	597.465.781.539,50
2	Belanja Barang dan Jasa	448.404.479.750,27	355.946.017.093,20
3	Bunga	0,00	0,00
4	Subsidi	0,00	0,00
5	Hibah	78.535.761.402,00	58.063.419.640,00
6	Bantuan Sosial	1.316.433.343,00	4.313.079.794,00
7	Bantuan Keuangan	277.125.866.745,00	235.110.561.774,00
8	Belanja Tak Terduga	360.250.000,00	1.546.266.050,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak ke Desa	2.895.367.424,00	2.928.080.492,00
10	Belanja Bagi Hasil Retribusi ke Desa	364.811.281,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar (B)	1.530.934.238.380,07	1.255.373.206.382,70
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A - B)	382.923.048.471,09	260.244.773.287,13



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	31 Desember 2024 (Rp) (408.821.729.537,00)	31 Desember 2023 (Rp) (326.347.304.151,00)
--------------	--	---	---

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp408.821.729.537,00) dan (Rp326.347.304.151,00) sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp82.474.425.386,00 atau 25,27% dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tahun 2023. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	Arus Kas Masuk		
1	Pendapatan Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	813.879.380,00	123.875.196,00
3	Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	134.607.704,00
4	Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
5	Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	0,00	374.300.000,00
6	Pendapatan Penjualan Atas Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk (A)	813.879.380,00	632.782.900,00
B	Arus Kas Keluar		
1	Belanja Tanah	8.641.969.686,00	1.764.136.373,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	45.482.320.204,00	61.730.827.143,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	142.482.443.020,00	101.496.171.267,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	208.499.077.592,00	151.926.623.257,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	423.108.025,00	1.019.078.919,00
6	Belanja Aset Lainnya	4.106.690.390,00	1.543.250.092,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	7.500.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar (B)	409.635.608.917,00	326.980.087.051,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (A – B)	(408.821.729.537,00)	(326.347.304.151,00)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		(41.269.000,00)	(353.279.233,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp41.269.000,00) dan (Rp353.279.233,00) sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp312.010.233,00) atau 88.32% dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2023. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Aktivitas Pembiayaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	Arus Kas Masuk		
1	Penggunaan Silpa	0,00	0,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pinjaman Angsuran Berjangka	7.540.412.000,00	7.646.720.767,00
4	Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) / Utang Belanja	0,00	0,00
5	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk (A)	7.540.412.000,00	7.646.720.767,00
B	Arus Kas Keluar		
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
3	Pinjaman Angsuran Berjangka	7.581.681.000,00	8.000.000.000,00
4	Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) / Utang Belanja	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar (B)	7.581.681.000,00	8.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (A – B)	(41.269.000,00)	(353.279.233,00)

5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		33.360.825.917,00	31.407.337.072,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.360.825.917,00 Dan Rp31.407.337.072 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.953.488.845,00 atau 6,22 % dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2023. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Aktivitas Non Anggaran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	Arus Kas Masuk		
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	a. PFK dari Gaji dan Tunjangan	33.360.825.917,00	31.407.337.072,00
	Jumlah Arus Kas Masuk (A)	33.360.825.917,00	31.407.337.072,00
B	Arus Kas Keluar		
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	a. PFK dari Gaji dan Tunjangan	33.360.825.917,00	31.407.337.072,00
	Jumlah Arus Kas Keluar (B)	33.360.825.917,00	31.407.337.072,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (A – B)	0,00	0,00

5.5.5	Kenaikan/(Penurunan) Kas	31 Desember 2024 (Rp) <u>(25.939.950.065,91)</u>	31 Desember 2023 (Rp) <u>(66.455.810.096,87)</u>
--------------	-------------------------------------	---	---

Kenaikan/(Penurunan) Kas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp25.939.950.065,91 dan Rp66.455.810.096,87 sehingga terdapat penurunan Kas sebesar Rp40.515.860.030,96 atau 60,97% dari jumlah Penurunan Kas tahun 2023. Rincian Penurunan Kas tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Neto)	382.923.048.471,09	260.244.773.287,13
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (Neto)	(408.821.729.537,00)	(326.347.304.151,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Neto)	(41.269.000,00)	(353.279.233,00)
4	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran (Neto)	0,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Kas	(25.939.950.065,91)	(66.455.810.096,87)

5.5.6	Saldo Akhir Kas	31 Desember 2024 (Rp) <u>195.224.794.889,53</u>	31 Desember 2023 (Rp) <u>221.164.744.955,44</u>
--------------	------------------------	--	--

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp195.224.794.889,53 dan Rp221.164.744.955,44 sehingga terdapat penurunan Saldo Akhir Kas sebesar Rp25.939.950.065,91 atau 11,73% dari Saldo Akhir Kas tahun 2023. Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	181.498.730.988,83	205.475.338.778,99
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerima	0,00	37.443.200,00
4	Kas di BLUD	9.588.617.202,89	15.373.307.774,71
5	Kas di BOS	249.400.748,81	278.655.201,74
6	Kas di BOK Puskesmas	3.888.045.949,00	0,00
	Jumlah	195.224.794.889,53	221.164.744.955,44



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan penghubung Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	<u>2.866.055.993.615,97</u>	<u>2.579.584.713.867,97</u>

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp2.866.055.993.615,97 dan Rp2.579.584.713.867,97 merupakan Saldo Awal Ekuitas Tahun 2023. Ekuitas Awal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp286.471.279.747,99 atau 11,11% dari Ekuitas Awal tahun 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.2 Surplus/Defisit – LO	<u>397.930.323.011,62</u>	<u>314.274.963.631,54</u>

Surplus/Defisit – LO Tahun 2024 sebesar Rp397.930.323.011,62 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Surplus/Defisit – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp83.655.359.380,08 atau 26,62% dari Surplus/Defisit – LO tahun 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>31.839.863.325,64</u>	<u>(27.803.683.883,54)</u>

Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024 Senilai Rp31.839.863.325,64 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan mendasar. Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.643.547.209,18 atau 46,62% dari Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 sebesar (Rp27.803.683.883,54).

Penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pusat – Dana Perimbangan	25.555.849.467,00
2	Investasi Jangka Panjang	3.057.964.178,35
3	Mutasi Tambah Antar SKPD	
	Aset Tetap Tanah	110.210.000,00
	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.281.355.834,16
	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	49.239.141.866,00
	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	19.668.512.907,18
4	Mutasi Kurang Antar SKPD	
	Aset Tetap Tanah	(110.210.000,00)
	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(2.802.048.334,16)
	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(49.239.141.866,00)
	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	(19.668.512.907,18)
	Aset Tetap Lainnya	(255.557.500,00)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Pengurangan Aset Tetap Karena Hibah	
	Aset Tetap Tanah	(72.000.000,00)
6	Koreksi Penyusutan	232.353.384.272,01
7	Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap	218.895.504,28
8	Koreksi Ekuitas Karena Hibah Peralatan Dan Mesin	(2.777.749.955,77)
9	Koreksi Ekuitas Karena Hibah Gedung Dan Bangunan	(5.244.009.691,83)
10	Penghapusan Peralatan Dan Mesin	(2.040.728.000,00)
11	Penghapusan Aset Lain-Lain	(15.336.178.854,79)
12	Penghapusan Penyusutan Aset Lain - Lain	7.098.386.209,16
13	Penyusutan Aset Lain - Lain	(305.173.309,44)
14	Pemindahan Penyusutan Aset Tetap Ke Aset Lainnya	(123.896.546,00)
15	Koreksi Amortisasi	(7.792.336.769,63)
16	Koreksi Ekuitas Pembiayaan	11.250.000,00
17	Treasury Deposit Facility	(205.912.535.000,00)
18	Koreksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	214.800.000,00
19	Koreksi Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.710.196.342,00
20	Koreksi Pendapatan Transfer Pusat	(4.520,00)
		31.839.863.325,64

Penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 63**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.6.4 Ekuitas Akhir	(Rp)	(Rp)
	3.295.826.179.953,23	2.866.055.993.615,97

Ekuitas Akhir Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.295.826.179.953,23 dan Rp2.866.055.993.615,97. Ekuitas Akhir tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp429.770.186.337,26 atau 15% dari Ekuitas Akhir tahun 2023. Ekuitas Akhir Tahun 2024 berasal dari Ekuitas Awal Tahun 2023 ditambah dengan Surplus/Defisit – LO ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (koreksi ekuitas) dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	2.866.055.993.615,97	2.579.584.713.867,97
Surplus/Defisit-LO	397.930.323.011,62	314.274.963.631,54
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar – Koreksi Ekuitas Lainnya	31.839.863.325,64	(27.803.683.883,54)
Ekuitas Akhir	3.295.826.179.953,23	2.866.055.993.615,97